



2025-2029

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

BALAI POM DI BENGKULU



Balai Pengawas Obat dan Makanan
Tahun 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Semangat Melayani, Responsif, Akuntabel



Balai POM di Bengkulu



@bpombengkulu



@bpom.bengkulu



Balai POM di Bengkulu



bengkulu.pom.go.id

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU

NOMOR HK.02.02.2B.12.25.152 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

BENGKULU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Bengkulu tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
- 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI BENGKULU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI BENGKULU TAHUN 2025-2029; |
| Kesatu | : | Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| Kedua | : | Renstra Balai POM di Bengkulu memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Bengkulu untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan; |
| Ketiga | : | Renstra Balai POM di Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
a. acuan bagi Balai POM di Bengkulu dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan |

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Balai POM di Bengkulu;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 05 Desember 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BENGKULU,



KODON TARIGAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan penyusunan yang telah ditetapkan. Dokumen ini merupakan instrumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan Balai POM di Bengkulu selama periode lima tahun ke depan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan POM, Balai POM di Bengkulu memiliki mandat strategis dalam mendukung terwujudnya sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Mandat ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan penguatan ketahanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama.

Penyusunan RENSTRA ini mengacu pada Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025–2029 di Lingkungan BPOM. Secara organisasi dan tata kerja, RENSTRA ini berlandaskan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022.

Lebih lanjut, sebagai Unit Pelaksana Teknis, landasan hukum operasional Balai POM di Bengkulu merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025. Landasan hukum ini menjadi acuan penting bagi Balai POM di Bengkulu dalam menyusun strategi pengawasan yang sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Lingkungan strategis periode 2025–2029 menunjukkan dinamika yang semakin kompleks. Pertumbuhan industri obat, makanan, dan produk inovasi kesehatan yang pesat, arus globalisasi perdagangan, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan potensi risiko baru yang memerlukan pengawasan ketat. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan. Kondisi ini menuntut Balai POM di Bengkulu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap aspek pengawasan.

RENSTRA Balai POM di Bengkulu Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, dan strategi pelaksanaan yang selaras dengan RENSTRA Badan POM, serta regulasi yang berlaku. Dokumen ini juga memuat rencana program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat melalui perlindungan obat dan makanan.

Pelaksanaan RENSTRA ini memerlukan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, instansi terkait, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, Balai POM di Bengkulu mengharapkan partisipasi aktif seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung implementasi dokumen perencanaan ini, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan RENSTRA ini. Semoga dokumen perencanaan ini dapat menjadi pedoman yang komprehensif, aplikatif, dan bermanfaat dalam mendukung terwujudnya masyarakat Bengkulu yang lebih sehat, terlindungi, dan berdaya saing.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, 7 Oktober 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Bengkulu,



Kodon Tarigan, S.Si, Apt

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Kondisi Umum	7
1.2	Potensi dan Permasalahan	38

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1	Visi	71
2.2	Misi.....	73
2.3	Tujuan	75
2.4	Sasaran Kegiatan	84

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1	Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	89
3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi BPOM di Bengkulu.....	93

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1	Target Kinerja	103
4.2	Kerangka Pendanaan.....	108

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Bengkulu Tahun 2025-2029.....	111
--	-----

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	15
Gambar 1.2 Sasaran Pengawasan Fasilitas Produksi Pangan	20
Gambar 1.3 Sasaran Pengawasan Fasilitas, Distribusi Obat, Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan	21
Gambar 1.4 Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2024	22
Gambar 1.5 Realisasi Nilai Kinerja Organisasi Periode 2020-2024	29
Gambar 1.6 Pemenuhan Standar Laboratorium Periode 2020-2024	41
Gambar 1.7 Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	42
Gambar 1.8 Trend Obat dan Makanan yang aman dan bermutu Tahun 2020-2024	45
Gambar 1.9 Trend Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Dan Mutu Obat dan Makanan 2020-2024	46

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Gambar 2.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)	107
---	-----

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.1 Waktu Tempuh Perjalanan di Wilayah Kerja	17
Tabel 1.2 Jumlah Sasaran Pengawasan Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	18
Tabel 1.3 Capaian Sasaran kegiatan 2020-2024.....	31
Tabel 1.4 Capaian Sasaran kegiatan dan IKU 2020-2024	32
Tabel 1.5 Nilai IP ASN BPOM di Bengkulu	67
Tabel 1.6 Matriks Ringkasan Analisis SWOT	101

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Tabel 2.1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan Sasaran kegiatan 2025-2029	112
Tabel 2.2 Indikasi Risiko Sasaran Program	116
Tabel 2.3 Matriks Kerangka Kinerja BPOM Bengkulu 2025-2029	128

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tabel 3.1 Penjabaran Aspek Transformasi 2025-2029.....	132
--	-----

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja 2025-2029	137
Tabel 4.2 Matriks Kerangka Pendanaan 2025-2029.....	141



BAB I

PENDAHULUAN

RENSTRA 2025–2029

Balai POM di Bengkulu
Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Periode pembangunan tahun **2025–2029** merupakan landasan awal dari upaya transformasi pembangunan nasional. Periode ini memiliki 8 prioritas nasional dan dirancang untuk menguatkan fondasi transformasi pembangunan, dengan sasaran utama peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Hal ini akan menjadi modal utama bagi Indonesia untuk mencapai target sebagai negara maju dan mewujudkan visi **Indonesia Emas 2045**.

Balai POM di Bengkulu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dimana tugas, fungsi dan kewenangan BPOM di Bengkulu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM di Bengkulu bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai POM di Bengkulu sebagai unit pelaksana teknis pengawas obat dan makanan di wilayah Provinsi Bengkulu, mulai tahun 2019 telah menerapkan sistem manajemen mutu yang bersertifikat ISO 9001:2015. Selain itu Balai POM di Bengkulu pada Bulan November 2020 telah di dire-akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN dengan nomor sertifikat LP-290-IDN berlaku hingga 21 Juni 2025. Diharapkan dengan diperolehnya kedua sertifikat tersebut semua pihak di Balai POM di Bengkulu dapat menerapkannya secara berkesinambungan dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi.

Kegiatan Balai POM di Bengkulu guna mendukung implementasi zona integritas yaitu dengan melaksanakan kampanye anti gratifikasi, penanganan Fraud Control Plan dengan adanya saluran pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system* serta penanganan Benturan kepentingan. Balai POM di Bengkulu juga telah mendapatkan sertifikasi ISO

37001;2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada bulan Agustus 2024 dengan nomor sertifikat MSAC-ABS-0096.

Balai POM di Bengkulu termasuk dalam kategori 21 Balai Pengawas Obat dan Makanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara Administratif dibina Oleh Sekretaris Utama.

Tugas pokok BPOM di Bengkulu adalah melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Fungsi BPOM di Bengkulu antara lain:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- g. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- i. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sebagai gambaran umum, luas wilayah Provinsi Bengkulu adalah 19.919,33 km², berbatasan dengan samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang 525 km. Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan dengan luas wilayah mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 Km². Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dengan jarak lebih kurang 567 kilometer.

Adapun cakupan pengawasan Balai POM di Bengkulu meliputi 7 Kabupaten/ Kota yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko.

Perjalanan dari Kantor Balai POM di Bengkulu ke wilayah kerja di Provinsi Bengkulu berkisar antara 1 – 8 Jam, untuk daerah kabupaten terjauh adalah kabupaten Mukomuko dengan jarak tempuh 8 jam, dan yang terdekat adalah kabupaten Bengkulu Tengah dengan jarak tempuh 1 jam. Khusus perjalanan ke pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, waktu yang ditempuh selama 12 jam dengan kapal laut dan 30 menit dengan pesawat udara.

Jumlah sarana pengawasan BPOM di Bengkulu tahun 2024 tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, mencakup fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian. Pada fasilitas produksi, sarana dominan berasal dari Industri Pangan (108 sarana) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP (1.579 sarana). Untuk fasilitas distribusi obat, pelayanan kefarmasian mendominasi dengan jumlah apotek sebanyak 386, dimana 203 di antaranya berlokasi di Kota Bengkulu. Selain itu tercatat 131 Puskesmas, 54 Klinik, 20 Rumah Sakit, serta 18 Pedagang Besar Farmasi (PBF), meskipun satu PBF ditutup pada pertengahan tahun dan dialihkan menjadi apotek.

Pada fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, jumlah terbanyak berasal dari Fasilitas Distribusi Kosmetik yang mencapai 347 sarana, termasuk 149 sarana di Kota Bengkulu. Untuk fasilitas produksi pangan, sasaran pengawasan mencakup IRTP dan Industri Pangan (MD).

Balai POM di Bengkulu menempatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai pilar strategis untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam setiap kebijakan dan layanan. Komitmen ini diarahkan melalui penguatan tata kelola internal dan penyediaan layanan publik yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok rentan, sebagai bagian dari pencapaian target Indeks Pelayanan Publik 2025–2029.

Pada tahun 2025, komitmen tersebut dipertegas dengan pembentukan Sub Pokja PUG melalui Keputusan No. HK.02.02.5A.5A5.06.23.25.80, yang berperan mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses kerja. Kepala Balai juga memastikan seluruh pegawai mengikuti pembelajaran e-learning PUG untuk meningkatkan sensitivitas dan responsivitas gender. Seluruh upaya ini bertujuan mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pengawasan Obat dan Makanan, sehingga pelayanan menjadi lebih adil dan inklusif bagi masyarakat.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM di Bengkulu periode 2025–2029 diinisiasi sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan. Renstra ini disusun tidak hanya untuk menjawab isu-isu aktual, tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai perubahan di masa mendatang, sejalan dengan pesatnya inovasi serta perkembangan industri Obat dan Makanan. Pendekatan tersebut memastikan BPOM di Bengkulu tetap relevan, adaptif, dan efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Renstra BPOM di Bengkulu tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen lembaga untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Bengkulu. Melalui implementasi strategi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, BPOM di Bengkulu bertekad menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan diri dan standar kinerja yang unggul. Dengan demikian, masyarakat Bengkulu diharapkan terus memperoleh akses terhadap Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

Proses penyusunan Renstra ini didasarkan pada evaluasi capaian kinerja BPOM di Bengkulu periode 2020–2024, serta berbagai masukan strategis dari BPOM. Melalui pembaruan arah kebijakan dan peningkatan efektivitas program, Renstra BPOM di

Bengkulu periode 2025–2029 diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja yang lebih optimal dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, BPOM di Bengkulu telah menerapkan sistem kerja sesuai PerMenPAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan PerMenPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah. Dengan ketentuan tersebut, hanya terdapat dua jabatan struktural, yaitu Kepala BPOM di Bengkulu dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM di Bengkulu dijalankan oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Kerja. Saat ini terdapat 12 Ketua Tim Kerja yang bertanggung jawab mengawal pencapaian 31 indikator kinerja.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu Tahun 2020 – 2024

Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu Tahun 2020 – 2024 merupakan bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana kerja strategis organisasi. Keberhasilan program selama periode ini dicerminkan melalui penguatan pengawasan keamanan obat dan makanan, serta peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat, yang semuanya terwujud meskipun menghadapi dinamika dan tantangan eksternal global.

Munculnya wabah covid-19 pada awal tahun 2020 membawa dampak yang luar biasa terhadap strategi yang dilaksanakan guna memastikan ketersediaan, keamanan, dan mutu obat serta makanan di tengah situasi darurat kesehatan. Perubahan strategi utama yang berfokus pada kesehatan dan sosial dengan mempercepat reformasi sektor kesehatan yang diberikan pada penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan ketersediaan tenaga medis, dan pengembangan industri farmasi serta alat kesehatan dalam negeri.

Selain itu terdapat juga program Jaring Pengaman Sosial dengan adanya Pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan sosial untuk melindungi masyarakat rentan yang terdampak pandemi. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli dan menekan angka kemiskinan yang berpotensi melonjak.

Dalam rangka pemulihan ekonomi sosial nasional dengan strategi ekonomi dialihkan untuk memberikan stimulus dan bantuan kepada pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dilakukan untuk mencegah kebangkrutan masal dan menjaga stabilitas ekonomi dan Pemerintah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, untuk beradaptasi dengan kondisi "normal baru".

Selama periode Renstra 2020-2024 dilakukan pengukuran kinerja guna menjamin ketercapaian dan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Realisasi pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 1.2 Realisasi Nilai Kinerja Organisasi Periode 2020-2024

Nilai kinerja organisasi (NKO) terendah pada tahun 2022 hal ini disebabkan dari 11 Sasaran Kegiatan hanya 4 sasaran kegiatan yang memenuhi ekspektasi dan terdapat 7 sasaran kegiatan yang belum memenuhi ekspektasi dengan capaian paling rendah terdapat pada indikator “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Mutu Obat Dan Makanan” hal ini disebabkan belum optimalnya capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Yang Aman dan Bermutu. Target sebesar 88% hanya tercapai 79.27% yang disebabkan oleh rendahnya capaian pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terutama untuk daerah pinggiran dan daerah yang belum mempunyai akses internet yang memadai.

Capaian indikator yang diampu oleh Balai POM di Bengkulu periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan capaian beragam yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Capaian Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Bengkulu Tahun 2020-2024

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu																
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat *	80.8	87.64	108.47	85	79.63	93.68	87.00	85.50	98.28	90.00	93.39	103.76	94	94.30	100.32
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	87.28	111.90	87	89.31	102.66	88.50	89.25	100.85	90.00	94.70	105.22	95.00	91.29	96.10
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91.16	101.29	91	82.11	90.23	91.50	87.38	95.49	92.00	91.03	98.95	92.50	92.39	99.88
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	69	71.32	103.36	71	80.81	113.81	73.00	89.29	122.31	74.00	92.59	125.13	96.00	83.95	87.45
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	86	83.33	96.90	89.00	96.77	108.74	90.00	88.33	98.15	93.00	94.29	101.38
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu																
1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	71	83.8	118.03	86	90.26	104.95	88.00	79.27	90.08	91.00	83.86	92.15	88.74	88.30	99.50
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	93.16	108.326	91.1	88.80	97.48	92.30	95.90	103.90	93.40	96.8	103.64	94.60	97.79	103.37

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Bengkulu	71	76.17	107.282	78.38	71.51	91.24	80.59	74.32	92.22	82.80	83.27	100.57	81.88	83.97	102.55
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Bengkulu	89.5	92.14	102.9497	94	90.53	96.31	95.00	95.23	100.24	96.00	97.07	101.11	97.00	96.99	99.99
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu																
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	73.72	84.74	89	82.88	93.12	91.00	98.00	107.69	93.00	98.00	105.38	98.00	100.00	102.04
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	42.93	78.05	60	58.54	97.57	65.00	60.71	93.40	70.00	83.43	119.18	80.00	90.03	112.54
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	98.54	115.93	99	99.65	100.65	99.00	100.00	101.01	100.0	100.00	100.00	100.0	100.00	100.00
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	57.3	114.60	57	75.28	132.07	61.00	65.00	106.56	66.00	76.79	116.34	76.36	58.93	77.17
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60.11	100.18	63	65.22	103.53	66.00	64.60	97.88	68.00	69.70	102.50	71.00	74.07	104.33
6	Indeks Pelayanan Publik	3.91	4.29	109.72	4.40	4.42	100.45	4.51	4.56	101.11	4.40	4.70	106.82	4.75	4.93	103.79

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
7	Persentase UMKM yang memenuhi standar	0	-					77.00	66.67	86.58	79.00	100.00	126.58	100.0	100.00	100.00
8	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-							95.00	99.88	105.14
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu																
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	71	92.26	129.94	92	94.85	103.10	93.80	94.42	100.66	95.70	95.89	100.20	96.8	97.01	100.22
2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100.00	40	40.00	100.00	59.00	59.00	100.00	78.00	78	100.00	97	97	100.00
3	Jumlah desa pangan aman	5	5	100.00	12	12.00	100.00	18.00	18.00	100.00	25.00	25	100.00	32	32	100.00
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	2	100.00	6	6.00	100.00	9.00	9.00	100.00	12.00	12	100.00	15	15	100.00
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu																
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	77.64	94.68	100	91.68	91.68	100.0	95.85	95.85	100.0	100	100.00	100.0	100.00	100.00
2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	93.99	125.32	100	88.46	88.46	100.0	91.19	91.19	100.0	100	100.00	100.0	100.00	100.00
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Balai POM di Bengkulu																

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	59	100	169.49	75	100.00	133.33	76.00	107.50	141.45	77.50	100.00	129.03	95.00	100.00	105.26
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Bengkulu yang optimal																
1	Indeks RB Balai POM di Bengkulu	90	81.33	90.37	81.5	81.52	100.02	82.50	85.75	103.94	83.50	88.01	105.40	90.47	87.95	97.21
2	Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu	80	73.3	91.63	74.3	75.90	102.15	75.30	76.10	101.06	76.30	75.54	99.00	80.11	79.41	99.13
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan													93.42	96.01	102.77
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Bengkulu yang berkinerja optimal																
1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Bengkulu	75	83.3	111.07	83.5	77.41	92.71	84.00	84.15	100.18	84.50	89.5	105.92	90.37	86.76	96.01
10 . Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan																
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	69.5	99.29	77	75.50	98.05	82.00	83.80	102.20	87.00	85.23	97.97	87.50	88.48	101.12
2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Bengkulu yang optimal	1.51	2	132.45	2	1.87	93.50	2.25	1.88	83.56	2.50	2.62	104.80	3.00	3	100.00
11.Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bengkulu secara Akuntabel																
1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu	93	93.45	100.48	93.5	90.30	96.58	94.10	90.84	96.54	95.30	91.1	95.59	87.50	92.91	106.18
2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Bengkulu	90	100	111.11	91	100.00	109.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	-	-	83.33	68.75	82.50	68.75	97.44	141.73	78.01	95	121.78

IKU		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
4	Pengelolaan BMN yang baik	-	-	-	-	-	-	60-79	64.00	-	70-74	95,7	-	87.50	98.02	112.02
5	Presentase Realisasi penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	60-79	64.00	-	70-74	95.70	-	60.00	71.37	118.95

(Sumber: Laporan Kinerja BPOM di Bengkulu 2020-2024)

Dalam perjalanannya jumlah indikator yang menjadi kinerja Balai POM di Bengkulu berubah - ubah, di awal tahun 2020 sebanyak 28 indikator sampai pada akhir Renstra menjadi 34 indikator kinerja.

Pengukuran kinerja Balai POM di Bengkulu mengacu pada Sasaran kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Bengkulu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Bengkulu. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, Balai POM di Bengkulu menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Kegiatan Prioritas Nasional Balai POM di Bengkulu selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Standarisasi Lembaga berupa implementasi *Good Laboratory Practice* Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan

Penerapan implementasi *Good Laboratory Practice* pada Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan bertujuan untuk menjamin Obat dan Makanan telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari produk Obat dan Makanan yang beredar yang dilakukan sampling berdasarkan analisa resiko. Hasil uji Laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk yang tidak memenuhi syarat.

Penerapan implementasi *Good Laboratory Practice* dipengaruhi oleh kemampuan uji yang dimiliki berupa Ruang Lingkup Laboratorium, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peralatan Laboratorium.



Gambar 1.3. Pemenuhan Standar Laboratorium Tahun 2020 - 2024

Capaian terendah nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP terjadi pada tahun 2023, hal ini disebabkan rendahnya nilai standar peralatan laboratorium yaitu masih dilakukannya metode spektrofotometri dan titrasi pada pengujian kosmetika, sedangkan metode ini sudah tidak dipergunakan lagi.

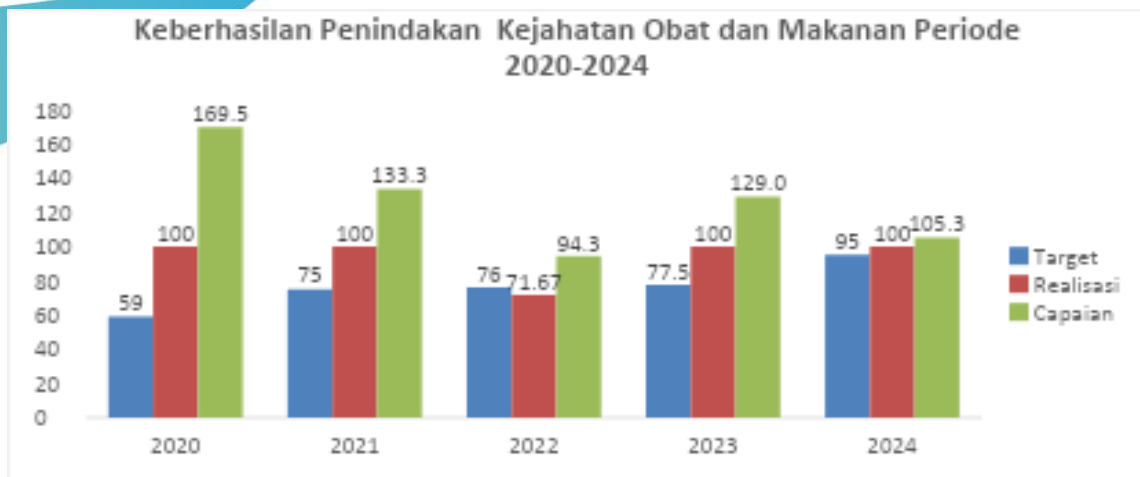
2. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Untuk memperkuat kegiatan penyidikan, dilakukan beberapa upaya perkuatan antara lain Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dalam kerangka ICJS (Integrated Criminal Justice System) yang melibatkan Korwas PPNS pada Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu serta K/L terkait. Balai POM di Bengkulu juga aktif melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara hingga tahap II (penyerahan barang bukti dan tersangka). Peningkatan kinerja dan profesionalisme PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) dioptimalkan guna mendukung kapasitas PPNS menjadi lebih baik.

Dari tahun 2020 – 2024 jumlah perkara yang sudah proses P21 adalah 14 Perkara dengan komoditi produk dominan adalah kosmetik tidak memenuhi ketentuan dan

obat-obat tertentu yang disalah gunakan dengan capaian selama periode tersebut sebagai berikut:



Gambar 1.4 Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024

Capaian indikator Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan paling rendah yaitu pada tahun 2022 hanya sebesar 94.3%, hal ini disebabkan adanya penambahan target 1 perkara yang masih berproses sampai pada tahap SPDP dan belum sampai tahap 2.

3. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga berupa kegiatan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, Desa Pangan Aman dan Pasar aman dari bahan berbahaya

Sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:

- a. Pembentukan Kader Keamanan Pangan dan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan.
- b. Pembinaan Implementasi program Desa Pangan Aman, Pasar aman dari bahan berbahaya dan sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yang aman kepada UPT BPOM dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sehingga pemberdayaan komunitas desa, pasar dan sekolah dapat berjalan dengan baik

dan terjadi perluasan cakupan implementasi melalui replikasi program oleh pemerintah daerah.

Intervensi dan pengawalan kepada Kab/Kota untuk menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang penerbitan SPP-IRT untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan, dalam menjalankan amanah UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan pre dan post market pangan industri rumah tangga dalam bentuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Obat dan Makanan.

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dari tahun 2020-2024 dari target yang ditetapkan telah mencapai 100%.

4. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM berupa UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar Usaha pangan resiko rendah dan sedang merupakan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh industri mikro kecil. Jenis industri ini, umumnya berupa industri rumah tangga pangan, merupakan proporsi terbesar dari industri pangan di tanah air dan menjadi salah satu penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu, perlu dukungan perkuatan daya saing dan intensifikasi sosialisasi ketentuan perundang-undangan.

Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM dalam rangka pengembangan UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen lintas sektor terkait UMKM untuk bersinergi dalam pembinaan ke UMKM, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha akan pentingnya implementasi prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk pangan, melakukan pendampingan terhadap UMKM binaan bersama antara Balai POM di Bengkulu dengan lintas sektor terkait dengan memberdayakan fasilitator yang telah dilatih.

5. Pengawasan dan Pengendalian Produk berupa Sampel Obat dan Makanan yang diperiksa Sesuai Standar serta Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan

yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

6. Sarana Bidang Kesehatan berupa Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai POM di Bengkulu. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk. Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel.

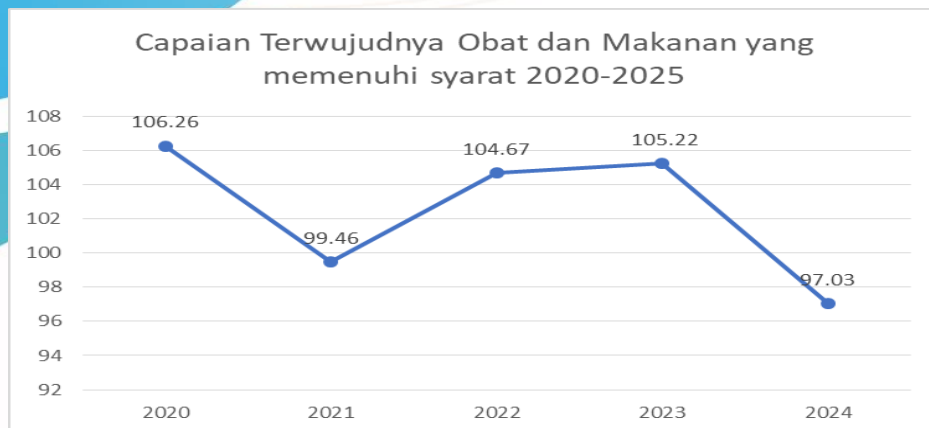
Balai POM di Bengkulu memiliki 11 Sasaran kegiatan (SK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Bengkulu

Obat dan makanan yang memenuhi syarat dilakukan sampling terhadap sampel random dan tergeted yang menggambarkan kondisi peredaran obat di wilayah provinsi Bengkulu. Kriteria memenuhi syarat dengan mempertimbangkan aspek keamanan/mutu yang lain (NIE, rusak/kadaluarsa, label/penandaan), tidak hanya ditentukan dari hasil pengujian laboratorium. SK1 ini diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, (2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, (3) Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan, (4) Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan, (5) Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat.

SK1 memiliki tren penurunan capaian kinerja yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.5 Tren Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 - 2024

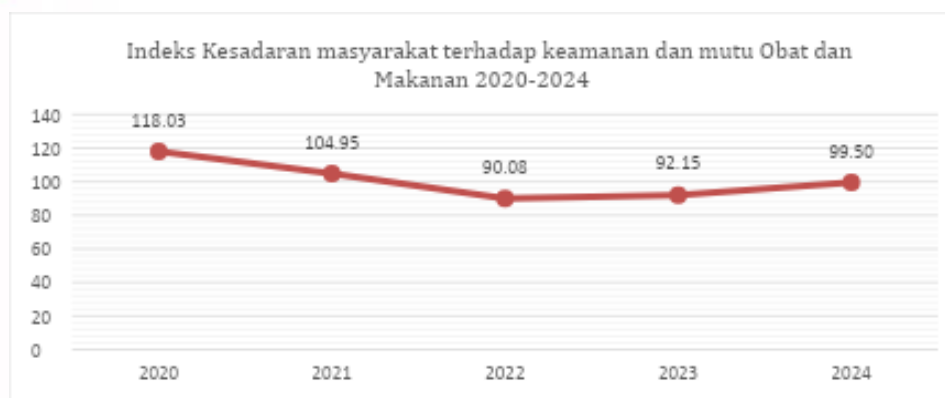
Dari ke-5 indikator tersebut indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan mempunyai tren capaian menurun, Kondisi ini disebabkan tingginya sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan terhadap penandaan/label, juga tidak memenuhi syarat uji yang sebagian besar adalah produk kosmetika. Selama periode 2020-2025 realisasi SK1 paling rendah pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 97.03%.

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Bengkulu

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM Bengkulu melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). SK2 ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Realisasi SK2 ini mengalami trend meningkat (moderat), dengan kenaikan yang stabil dan kenaikan tidak signifikan secara drastis, berdasarkan perhitungan trend analysis 2020-2024 besaran kenaikan yaitu 98.47%, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Gambar 1.6. Tren Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan 2020-2024

Selama periode tersebut capaian paling rendah pada tahun 2022, hal ini disebabkan dari ketiga komponen pembentuk indeks kesadaran masyarakat, tingkat perilaku masyarakat mempunyai nilai yang paling rendah terutama pada tingkat perilaku terhadap pangan olahan. Tingkat perilaku meliputi masyarakat yang membeli produk dengan kemasan rusak, masih kurangnya membaca informasi label, tidak patuhnya terhadap pemakaian produk sesuai petunjuk, penyimpanan yang tidak sesuai label pada kemasan, membeli tanpa izin edar, dan kurangnya membaca informasi kadaluarsa.

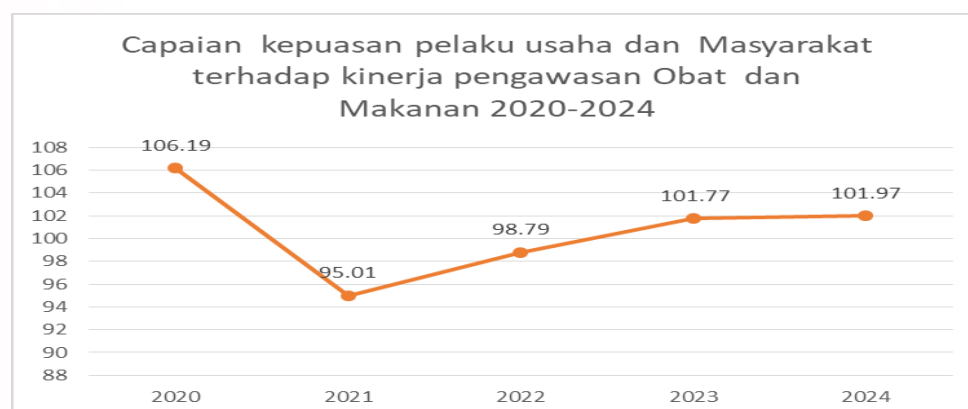
3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Bengkulu

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan, yang diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri. SK3 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan

Makanan, (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Bengkulu, (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Bengkulu.

Realisasi SK3 ini mengalami tren meningkat (on the track), kenaikan capaian indikator menunjukkan kenaikan yang positif dan pada jalur yang ditetapkan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Gambar 1.7 Tren Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

Selama periode tersebut capaian paling rendah pada tahun 2021 sebesar 95.01%, hal ini disebabkan rendahnya capaian indikator pada Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Bengkulu terhadap produk kosmetika, masih kurangnya layanan informasi tentang keamanan obat dan makanan serta kurangnya jangkauan penyebaran layanan informasi di wilayah yang sulit dijangkau.

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

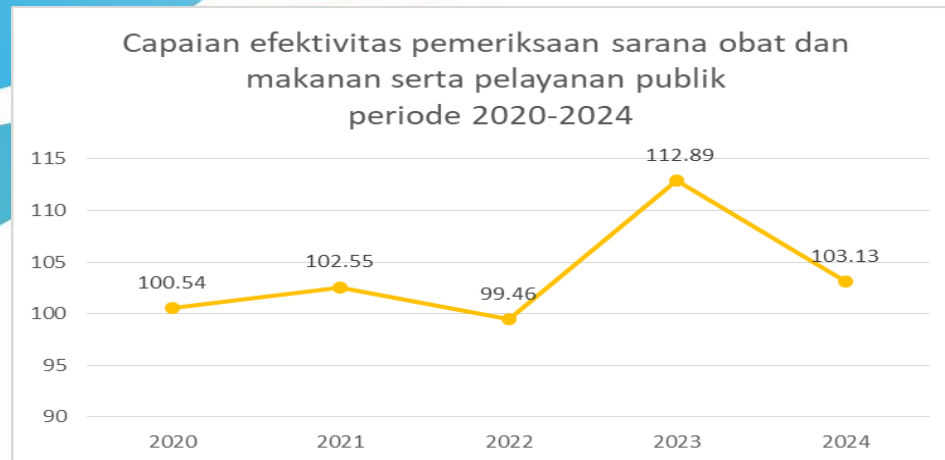
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Bengkulu

BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

SK4 ini diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja yaitu (1) Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan, (2) Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan, (3) Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu, (4) Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan (5) Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan (6) Indeks Pelayanan Publik (7) Persentase UMKM yang Memenuhi Standar (8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Realisasi indikator pada SK4 ini mempunyai trend capaian meningkat (on the track) dan stagnan. **Tren meningkat (On the Track)** yaitu pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Indeks Pelayanan Publik, Persentase UMKM yang memenuhi standar, sedangkan yang mempunyai **tren stagnan** yaitu Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Untuk indikator “Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota”, belum dapat dilakukan tren analisisnya disebabkan baru pada akhir renstra (tahun 2024) ditetapkan menjadi indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai POM di Bengkulu. Realisasi SK4 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Selama periode tersebut capaian paling rendah pada tahun 2022 sebesar 99.46%, hal ini disebabkan belum optimal.



Gambar 1.8 Capaian Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik Periode 2020-2024

Capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar dan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan. Hal ini disebabkan ada sarana produksi obat tradisional yang belum terpenuhi sertifikat CPOTB, dan rendahnya pemenuhan CAPA oleh pemangku kepentingan.

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Bengkulu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Bengkulu mampu melindungi masyarakat dengan optimal. SK5 ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu (1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, (3) Jumlah Desa Pangan Aman, (4) Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi indikator pada SK5 capaian sebagai berikut :



Gambar 1.9 Capaian Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan 2020-2025

Realisasi paling tinggi pada tahun 2020 disebabkan tingginya capaian indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, hal ini disebabkan target yang rendah pada indikator tersebut (71%). Pada tahun- tahun selanjutnya target sudah dinaikkan diatas 90% sehingga capaian sudah dalam range yang diinginkan.

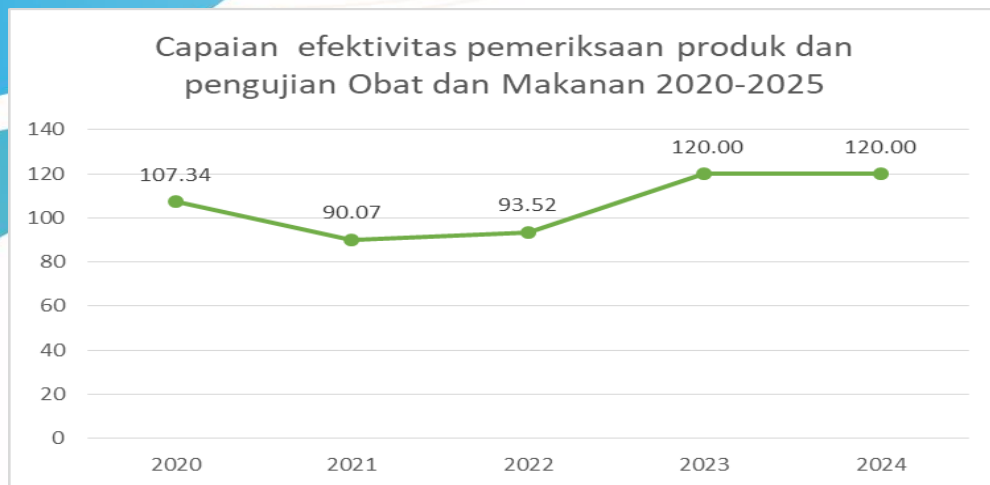
6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Bengkulu

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Bengkulu merupakan suatu proses yang komprehensif. Salah satu prosesnya adalah pengujian sampel di laboratorium. Produk yang di sampling berdasarkan risiko, kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Bengkulu.

SK6 ini diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu (1) Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, (2) Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.

Realisasi indikator pada SK6 ini mempunyai trend capaian meningkat (on the track) dengan capaian sebagai berikut :



Gambar 1.10 Capaian Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan 2020-2025

Capaian paling rendah pada tahun 2021 sebesar 90.07%, hal ini disebabkan pada akhir tahun 2021 merupakan puncak terjadinya wabah Covid 19, banyak tenaga penguji yang menjalani isolasi mandiri sehingga mengganggu ritme pengujian obat dan makanan. Selain itu terdapat beberapa peralatan laboratorium berupa HPLC, GC dan Mikrowave yang mengalami kerusakan pada pertengahan tahun hingga akhir tahun.

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Masing – Masing wWilayah Kerja Balai POM di Bengkulu

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

SK7 ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu (1) Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan. Capaian indikator pada SK7 ini mempunyai tren capaian meningkat (on the track) dengan capaian sebagai berikut :



Gambar 1.11 Capaian Efektivitas Penindakan Pejahatan Obat dan Makanan di Masing-Masing Wilayah Kerja Balai POM di Bengkulu

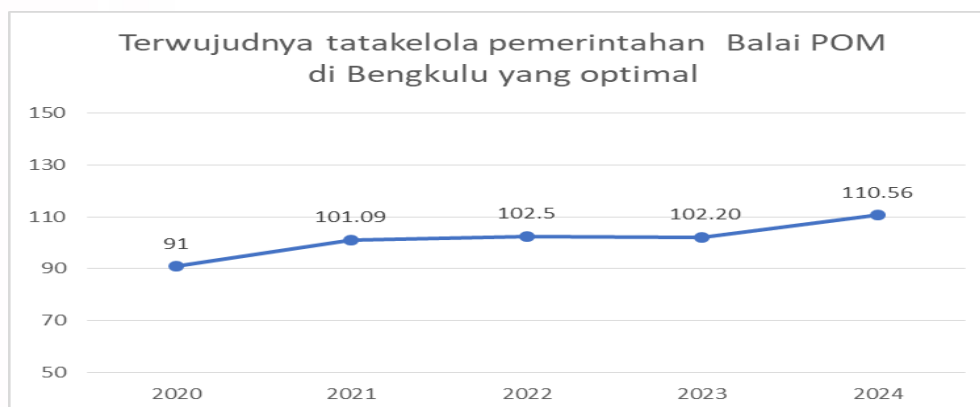
Capaian paling rendah pada tahun 2022 sebesar 94.3%, hal ini disebabkan Balai POM Bengkulu merespon maraknya peredaran Obat Obat Tertentu (OOT) yang beredar di wilayah kerja Balai POM Bengkulu, sehingga menambah target 1 perkara yang masih berproses sampai pada tahap SPDP, dimana berdasarkan manual IKU perkara yang dianggap selesai adalah yang sudah tahap II, sehingga berpengaruh terhadap capaian tahun 2022.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Bengkulu yang Optimal

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat dengan melaksanakan Zona Integritas (ZI) dengan 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Bengkulu akan meningkat. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Bengkulu untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine).

SK8 ini diukur dengan 2(dua) indikator (untuk tahun 2020-2023) yaitu (1) Indeks RB Balai POM di Bengkulu, (2) Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu, sedangkan pada tahun 2024 terdapat penambahan 1(satu) indikator yaitu Nilai Pengelolaan Kearsipan. Capaian indikator pada SK8 ini mempunyai tren capaian meningkat (moderat) dengan capaian sebagai berikut :



Gambar 1.12 Capaian SK Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Bengkulu yang Optimal

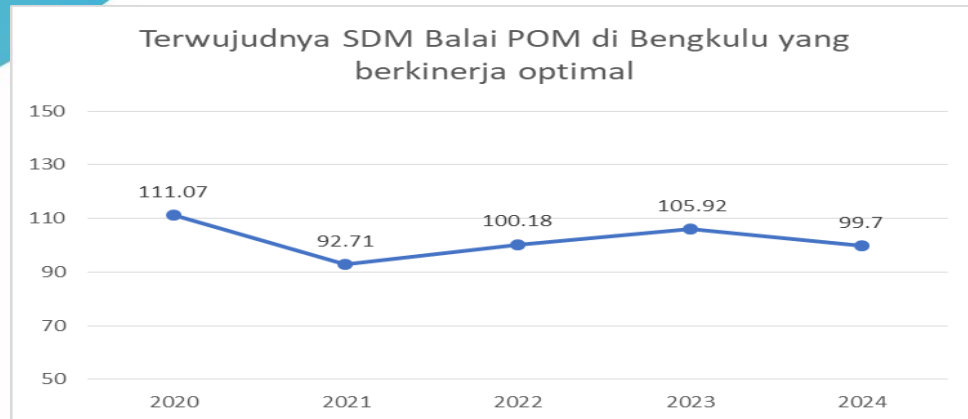
Capaian paling rendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 91%, hal ini disebabkan kedua indikator tersebut capaiannya masih di bawah target yang ditetapkan, Indeks RB hanya tercapai 90.37% dan Nilai AKIP 91.63%. Hal ini disebabkan implementasi kedua indikator tersebut belum optimal di Balai POM Bengkulu.

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terwujudnya SDM Balai POM di Bengkulu yang Berkinerja Optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. SK8 ini diukur dengan 1(satu)

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Bengkulu. SK 9 ini mempunyai tren capaian meningkat (*on the track*) dengan capaian sebagai berikut :



Gambar 1.13 Trend Capaian SK : Terwujudnya SDM Balai POM di Bengkulu yang Berkinerja Optimal

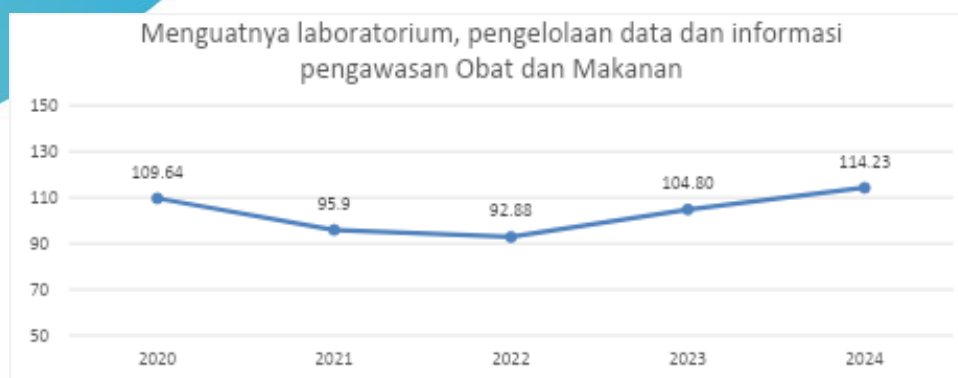
Capaian paling rendah yaitu pada tahun 2021 sebesar 92.71%, disebabkan rendahnya kualifikasi SDM yang diukur dari tingkat pendidikan dan tingkat kompetensi SDM yang dilihat dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.

10. Sasaran Kegiatan (SK10)

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Bengkulu di era digital ini. SK10 ini didukung oleh 2(dua) indikator kinerja yaitu (1) Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar

GLP, (2) Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan capaian sebagai berikut:



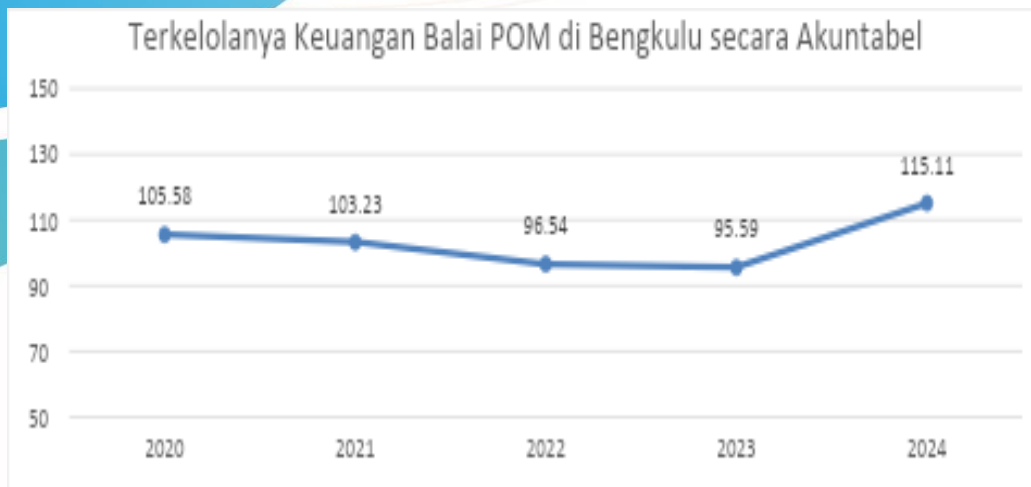
Gambar 1.14 Capaian SK : Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Capaian paling rendah yaitu pada tahun 2022 disebabkan belum optimalnya capaian Indeks pengelolaan data dan informasi yang mendukung sasaran kegiatan tersebut. Target sebesar 2.25 hanya terealisasi 1.88 atau capaian sebesar 83.56%.

11. Sasaran Kegiatan (SK11)

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bengkulu secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat sasaran. SK11 ini didukung oleh 2 (dua) indikator (periode 2020-2021) dan 1 (satu) indikator periode 2022-2024. Kedua indikator tersebut yaitu (1) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu, dan (2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Bengkulu dengan capaian sebagai berikut :



Gambar 1.15 Trend Capaian SK : Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bengkulu secara Akuntabel

Capaian paling rendah pada tahun 2023 disebabkan nilai EKA yang diperoleh sebesar 87.50 dan IKPA 96.51. Hal ini disebabkan rendahnya capaian kualitas perencanaan anggaran berupa deviasi dalam III DIPA yang nilainya rendah.

Aspirasi atau Ekspektasi Masyarakat terkait Kinerja Balai POM di Bengkulu

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diperbarui dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Balai POM di Bengkulu memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Balai POM di Bengkulu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan Balai POM di Bengkulu untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, Balai POM di Bengkulu dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengawasi peredaran obat-obatan, dan memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman dan berkualitas.

Aspirasi masyarakat juga membantu Balai POM di Bengkulu dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar Balai POM di Bengkulu dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu 2025-2029.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Bengkulu menjangkarkan *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui pemanfaatan hasil Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Balai POM di Bengkulu Tahun 2020-2024 serta melalui identifikasi pihak berkepentingan guna mengetahui harapan yang diinginkan masyarakat/instansi terkait.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, Balai POM di Bengkulu dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengawasi peredaran obat-obatan, dan memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman dan berkualitas.

Aspirasi masyarakat juga membantu Balai POM di Bengkulu dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar Balai POM di Bengkulu dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu 2025-2029.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Bengkulu menjangkari *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Balai POM di Bengkulu Tahun 2024.

1. Adapun secara garis besar aspirasi atau ekspektasi masyarakat terhadap Balai POM di Bengkulu yaitu:
2. Balai POM di Bengkulu diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi maupun produk pangan .
3. Balai POM di Bengkulu dapat memberikan jaminan atas keamanan produk yang beredar di masyarakat.
4. Balai POM di Bengkulu secara intensif dapat memberikan sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat.
5. Melakukan pendampingan pembuatan sertifikat izin edar makanan

Selain hal tersebut diatas Balai POM di Bengkulu juga diharapkan dapat memberikan kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki yang mengakui perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan peran antara semua gender.

Balai POM di Bengkulu juga diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada kelompok rentan dalam memberikan perlindungan dan dukungan khusus kepada individu atau kelompok masyarakat yang menghadapi risiko tinggi terhadap diskriminasi, kekerasan, atau marginalisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan mereka dapat mengakses hak-hak dasar dan memiliki kesempatan yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya. Harapan masyarakat juga terhadap peningkatan pelayanan publik berbasis HAM yang dapat memberikan jaminan setiap individu memiliki hak untuk menerima pelayanan yang berkualitas, adil, dan bermartabat, tanpa memandang latar belakangnya.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra Balai POM di Bengkulu 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Balai POM di Bengkulu, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai POM di Bengkulu dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai POM di Bengkulu dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Balai POM di Bengkulu diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Balai POM di Bengkulu tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga

dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Bengkulu menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Bengkulu periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Bengkulu, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1. Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Bengkulu, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Bengkulu keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Bengkulu di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Bengkulu, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Dukungan regulasi perizinan sediaan farmasi dan pangan olahan

Balai POM di Bengkulu yang merupakan bagian Unit Pelaksana Teknis Badan POM melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19

tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memastikan setiap unit kerja di daerah dapat berfungsi secara efisien, terkoordinasi, dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah, seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2021 tentang Pengawasan Obat dan Makanan, serta Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu terkait pengendalian obat dan pangan, menjadi peluang penting bagi Balai POM Bengkulu dalam melaksanakan tupoksi jaminan keamanan obat dan makanan. Regulasi yang jelas dan tegas ini memperkuat kewenangan Balai POM untuk melakukan pengawasan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya payung hukum yang kokoh, Balai POM dapat meningkatkan efektivitas pengendalian produk beredar serta memperkuat kerja sama lintas sektor, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas produk obat dan pangan di Provinsi Bengkulu.

2. Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor yang Solid

Balai POM di Bengkulu telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, industri obat dan makanan, lembaga penelitian, serta organisasi internasional. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai POM di Bengkulu dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, Balai POM di Bengkulu dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal.

Kerjasama yang telah dilaksanakan Balai POM di Bengkulu sebagai berikut :

1. Terjalin koordinasi baik dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan, Disperindag, Kepolisian, BNN, DPMPSTP, Perguruan Tinggi) dan media masa dalam pengawasan, tindak lanjut pemberitaan /edukasi kepada masyarakat.
2. Kerjasama dengan jasa pengiriman (JNE, J&T, dan SPX) untuk mempermudah pengawasan bidang obat dan makanan berbasis risiko.

3. Koordinasi yang kuat dengan Sistem Peradilan Pidana, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, untuk mendukung penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
4. Keterlibatan komunitas berbasis SAKA POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.

3. Dukungan Anggota Legislatif terkait KIE Masyarakat

Dukungan legislatif memperkuat advokasi kebijakan dan alokasi anggaran yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program KIE Masyarakat mengenai obat dan makanan yang aman dan bermutu. Melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), anggota legislatif terutama komisi IX DPR RI aktif berkolaborasi dengan BPOM Bengkulu untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil. Bentuk dukungan ini diwujudkan dalam penyelenggaraan sosialisasi, dialog publik, serta kampanye kesehatan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara mengenali produk berizin edar, membaca label, serta menghindari obat ilegal atau pangan olahan yang tidak memenuhi standar.

Dukungan anggota legislatif memiliki peran penting dalam memperkuat upaya edukasi masyarakat mengenai pentingnya obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Melalui fungsi representasi dan pengawasan, anggota legislatif turut mendorong peningkatan literasi masyarakat dalam memilih produk yang sesuai ketentuan, serta memastikan program pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan berjalan secara optimal

Tabel 1.5. Data Anggaran TOMAS

Tahun	Jumlah titik	Jumlah peserta (orang)	Anggaran (Rupiah)
2023	20	10000	2.983.978.000
2024	25	6250	1.922.792.000
2025	10	2000	629.366.000

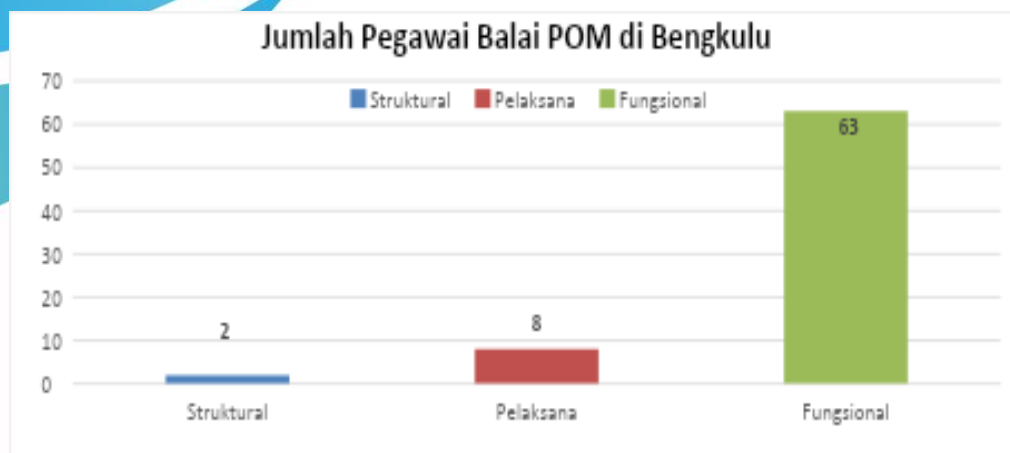
4. Pengalaman dan Kompetensi Teknis SDM Balai POM di Bengkulu

Balai POM di Bengkulu didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan Obat dan Makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Balai POM di Bengkulu mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

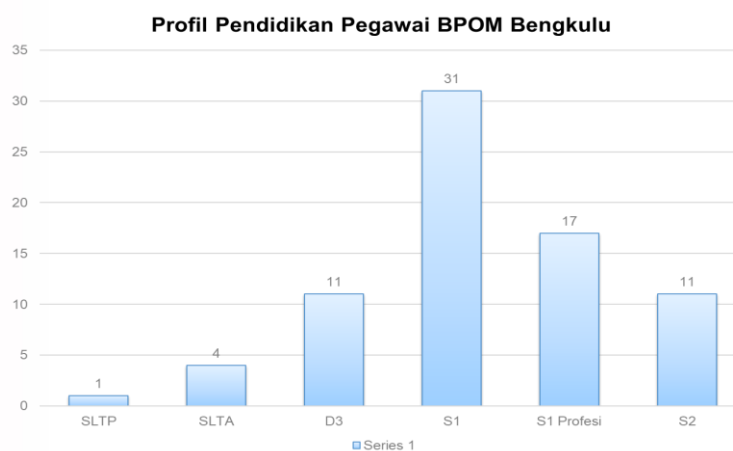
Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Bengkulu merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM Balai POM di Bengkulu terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap Obat dan Makanan. Untuk dapat melakukan Pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, Balai POM di Bengkulu memiliki 8 Jabatan Fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan Tahun 2024, sebanyak 63 pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. Dari jumlah tersebut sebanyak 54 pegawai merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang terdiri dari 33 (61.1%) pegawai dengan spesialisasi pada fungsi pengujian, 10 (18.5 %) pegawai dengan spesialisasi fungsi pemeriksaan, 7 (12.96%) pegawai dengan spesialisasi fungsi penyuluhan, 4 (7.4%) pegawai dengan spesialisasi fungsi penindakan, teknis maupun spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah.

Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Balai POM di Bengkulu juga didukung dengan 15,625% Jabatan Fungsional lainnya.

Jumlah Pegawai Balai POM di Bengkulu seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

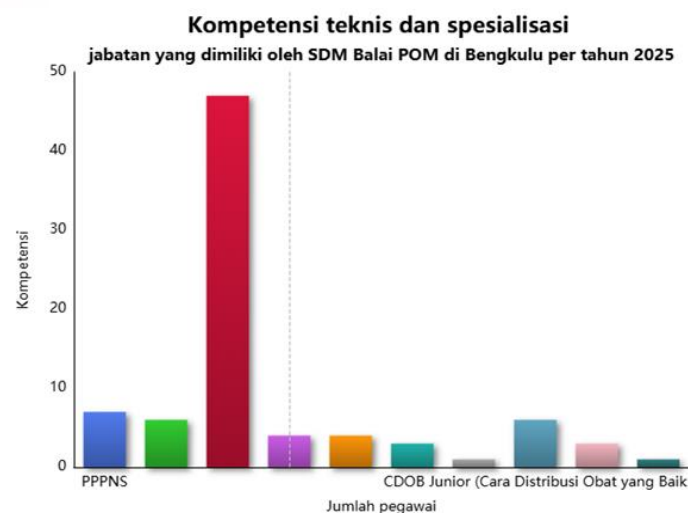


Gambar 1.16 Jumlah Pegawai Struktural, Pelaksana dan Fungsional Balai POM di Bengkulu



Total Pegawai BPOM Bengkulu 75 Pegawai

Gambar 1.17 Jumlah Pegawai BPOM di Bengkulu



Gambar 1.18 Kompetensi Pegawai di Balai POM di Bengkulu per tahun 2025

Kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Bengkulu tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup tanggapan terhadap tantangan baru yang muncul, seperti kemunculan produk inovatif, bahan dan kontaminan baru yang memerlukan evaluasi khusus dan metodologi pengujian yang diperbaharui. Untuk memastikan kemampuan tersebut tetap terjaga dan berkembang, Balai POM di Bengkulu secara rutin melaksanakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh SDM-nya. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pengawasan hingga pemahaman tentang inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi kompetensi dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, SDM Balai POM di Bengkulu tidak hanya dapat menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang di sektor pengawasan Obat dan Makanan.

Pengembangan kompetensi pegawai pada Periode 2020-2024 dari target 20 JP sudah terpenuhi 100% baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Pengembangan kompetensi yang berhubungan dengan jabatan fungsional masing masing pegawai sudah dilaksanakan yang diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai.

Tabel 1.5. Nilai IP ASN Balai POM di Bengkulu

No	Dimensi	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Kualifikasi	15,18	15,17	20,61	21.81
2	Kompetensi	32,57	39,21	38,93	35
3	Kinerja	25,08	25	25	25
4	Disiplin	4,93	4,94	5	4.96
	Nilai IP	77,98	84,33	89,54	86.76
	Target	83,5	84	84,5	91

Selama tahun 2020 sampai dengan 2024, Balai POM di Bengkulu telah melakukan pelatihan teknis berbasis kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda kepada 3 orang dan District Food Inspector Junior kepada 2 SDM, District Food Inspector Junior kepada 5 orang.

Dengan mengandalkan pengalaman dan keahlian teknis yang komprehensif, Balai POM di Bengkulu dapat merancang strategi pengawasan yang tidak hanya efektif namun juga inovatif, menjamin perlindungan terbaik bagi kesehatan masyarakat. Hal ini menegaskan peran BPOM sebagai lembaga yang tidak hanya merespons masalah yang ada tetapi juga secara proaktif mencegah munculnya masalah baru, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

Untuk meningkatkan sensitivitas terhadap gender seluruh pegawai di Balai POM Bengkulu sampai awal tahun 2025 sudah 100% mengikuti pembelajaran e-learning Pengarusutamaan Gender, agar responsive gender dapat merata baik di level pimpinan dan staf. Harapannya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari semakin mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi

Balai POM di Bengkulu memiliki laboratorium yang dapat menjamin bahwa setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat, melindungi kesehatan masyarakat dari risiko produk Obat dan Makanan yang tidak aman.

Laboratorium dilengkapi dengan kemampuan pengujian yang beragam yang dapat melakukan pengujian terhadap berbagai aspek produk Obat dan Makanan, mulai dari analisis mikrobiologis hingga pengujian kimia dan toksikologi. Kemampuan ini memastikan bahwa Balai POM di Bengkulu tidak hanya responsif terhadap isu keamanan yang muncul tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum berdampak pada kesehatan masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat antara stakeholder Balai POM di Bengkulu memperkuat jaringan pengawasan produk Obat dan Makanan dan memastikan bahwa tindakan pengujian didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang akurat, mendukung komitmen dalam menjaga standar kesehatan masyarakat yang tinggi.

Laboratorium Pengujian Balai POM di Bengkulu mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium yang berstandarisasi ISO 17025 : 2005 sejak tahun 2005 dan berkomitmen sebagai penjaminan validitas hasil pengujian dengan mempertahankan status akreditasi sebagai laboratorium pengendali mutu untuk pengujian sehingga memerlukan komitmen secara menyeluruh dari berbagai pihak yang terkait, dimana Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai POM di Bengkulu meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2024 memperoleh nilai SKL 88,48 dari target 87,5.

Pada bulan November 2020, Balai POM di Bengkulu berhasil mendapatkan reakreditasi dengan nomor sertifikat LP-290-IDN dengan masa berlaku hingga 21 Juni 2025. Untuk mempertahankan status akreditasinya, Balai POM di Bengkulu terus melakukan asesmen surveilan secara berkala. Mengingat sertifikat sebelumnya berlaku hingga Juni 2025, Balai POM di Bengkulu kembali melaksanakan reakreditasi dan memperoleh sertifikat akreditasi KAN pada Bulan Juni 2025 ini. Dengan demikian, komitmen Balai POM di Bengkulu untuk menjamin validitas hasil pengujian tetap terjaga dengan terus mempertahankan status akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 secara menyeluruh.

Awal tahun 2020 menjadi titik balik di mana terjadi pandemi Covid 19. Dalam hal ini, Balai POM di Bengkulu berkontribusi dalam percepatan pengujian dan mendukung upaya kesehatan masyarakat. Balai POM di Bengkulu memiliki satu unit PCR (Polymerase Chain Reaction) yang dipinjamkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang digunakan untuk mendeteksi adanya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2 (SARS-Cov-2) yang menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu Balai POM di Bengkulu juga merintis laboratorium pengujian sampel COVID-19.

Laboratorium juga mengembangkan inovasi internal untuk meningkatkan efisiensi kerja, seperti SINTAGELIS (Sistem Pencatatan Alat Gelas) yang bertujuan untuk mendukung pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ini adalah aplikasi internal yang dikembangkan oleh Balai POM di Bengkulu untuk mencatat dan mengelola alat-alat gelas yang digunakan di laboratorium secara digital. Aplikasi ini mengubah cara kerja manual yang rentan kesalahan menjadi sistem yang lebih efisien dan akurat. Dengan pencatatan digital, data tentang alat gelas (jenis, jumlah, kondisi, dan lokasi) dapat dimasukkan dengan cepat dan tepat. Ini mengurangi risiko kesalahan input yang sering terjadi pada pencatatan manual di buku atau spreadsheet. Proses inventarisasi juga menjadi lebih efisien karena data dapat diakses dan diperbarui secara *real-time*. Dalam ISO 17025 untuk laboratorium pengujian, mengharuskan adanya sistem manajemen peralatan yang efektif. Aplikasi pencatatan digital dapat membantu memenuhi persyaratan ini dengan menyediakan dokumentasi yang lengkap dan mudah diaudit.

Selain itu, laboratorium Balai POM di Bengkulu juga memiliki inovasi INSTRUMATE (*Instrument Maintenance & Assistance*). INSTRUMATE merupakan wadah bagi penguji laboratorium Balai POM di Bengkulu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

dalam pemeliharaan serta mengatasi permasalahan alat laboratorium. Melalui inovasi ini, tim INSTRUMATE dapat menerima laporan kendala yang terjadi pada alat laboratorium dan melakukan pengecekan serta perbaikan dengan berkoordinasi dengan teknisi alat. Terdapat beberapa orang tim INSTRUMATE yang memiliki keahlian dalam melakukan pengecekan kendala alat laboratorium dan melakukan perbaikan dari tingkat rendah sampai dengan sedang. Personel tersebut telah mendapatkan pelatihan terkait pemeliharaan alat seperti KCKT, GC, GCMS dan AAS. Diharapkan melalui inovasi ini dapat menurunkan biaya pemeliharaan alat laboratorium dibandingkan tahun sebelumnya.

Laboratorium Balai POM di Bengkulu didukung fasilitas peralatan yang sangat memadai. Dari tahun 2020-2025 terdapat penambahan peralatan laboratorium untuk alat utama yaitu HPLC Shimadzu 1 unit, HPLC Thermo 1 unit, GCMS Shimadzu 1 unit, Disolusi Vision elite 8 Hanson 1 unit, lemari asam labolytic 1 unit, Polarimeter merk Kruss 1 unit. Dan untuk alat penunjang yaitu PH meter Ohaus 1 unit, timbangan semimikro sartorius 1 unit, water purifier ADRONA 1 unit, Autoclave 1 unit, BSC 1 unit, Desikator sanplatec 2 unit.

Selama periode 2020-2024 beberapa peralatan juga sudah mengalami perubahan kondisi menjadi rusak berat dan sudah dilaporkan ke bagian pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) untuk diusulkan penghapusan. Pengurangan peralatan laboratorium dilakukan karena peralatan tersebut sudah rusak, masa pakai lebih dari 10 tahun dan suku cadangnya sudah diskontinyu diantaranya yaitu Disolusi Hanson tahun perolehan 2012, Rotary Evaporator Heidolph tahun perolehan 2015, Protein Analyzer Buch tahun perolehan 2009, Alfatoxin Test Package tahun perolehan 2015, Shimadzu sil 20 AHT (Autosampler HPLC) tahun perolehan 2013, Dry Oven 3 unit, PH Meter Bench 1300F tahun perolehan 2015, Laminar air flow merk Nuiare tahun 1985, Incubator 2 unit, Hygrometer 3 unit, Shaking Waterbath merek memert tahun perolehan 2017.

Selain peralatan laboratorium dalam melakukan pengujian juga berdasarkan metode analisis yang mengadopsi metode analisis terkini sesuai dengan pedoman sampling yang diterapkan di Badan POM. Metode analisis tersebut diantaranya adalah Farmakope Indonesia (FI) Edisi VI, *United State of Pharmacopoeia* (USP), *British Pharmacopoeia*, Standar Nasional Indonesia (SNI), *Asean Cosmetic Method* (ACM), Metode Analisis Internal yang dikembangkan oleh PPPOMN dan lain lain. Dalam perjalanan 5 tahun ini,

Balai POM di Bengkulu melakukan verifikasi terhadap metode tersebut untuk memastikan bahwa metode tersebut dapat diterapkan di Laboratorium Uji Balai POM di Bengkulu.

Ruang lingkup pengujian meliputi metode yang didaftarkan pada Lembaga Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), berjumlah 225 Parameter uji (PU), dengan rincian Terapeutik 11 PU, Obat bahan alam dan Suplemen 47 PU, Kosmetik 49 PU, Pangan 11 PU dan Mikrobiologi 107 PU. Selain metode yang didaftarkan pada lembaga diatas, Balai POM di Bengkulu juga memiliki Standar Ruang Lingkup (SRL) yang berisi metode standar dari PPPOMN untuk pengujian. Pada tahun 2024 Balai POM di Bengkulu menempati Peringkat ke 10 dari Balai/Balai Besar POM se Indonesia dalam pemenuhan SRL pada TW III tahun 2024, yang artinya Balai POM di Bengkulu termasuk dalam 10 besar laboratorium terbaik di lingkungan Badan POM.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memulai implementasi sistem regionalisasi laboratorium pada tahun 2021 melalui sebuah pilot project. Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran laboratorium pengujian sebagai tulang punggung pengambilan keputusan berbasis data ilmiah dalam sistem pengawasan yang berbasis risiko.

Regionalisasi laboratorium merupakan pengelompokan laboratorium berdasarkan spesialisasi pengujian, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan.

Setelah dilakukan pilot project pada tahun 2021, BPOM mulai memberlakukan sistem regionalisasi laboratorium secara bertahap pada tahun 2022. Tahapan ini menandai peralihan dari fase uji coba menuju implementasi operasional di lapangan, dengan pembagian wilayah kerja yang lebih terstruktur dan peran laboratorium yang lebih difokuskan berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kebutuhan pengawasan di masing-masing wilayah. Regionalisasi dibagi ke dalam 7 regional, dimana Balai POM di Bengkulu masuk ke Regional Padang

Sebelum diterapkannya sistem regionalisasi pada tahun 2021, Laboratorium Balai POM di Bengkulu melakukan pengujian secara menyeluruh untuk semua komoditi yang sampling di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu. Untuk Komodi kimia obat semua kelas terapi (14 kelas terapi) diuji oleh Balai POM Bengkulu, begitu juga untuk komoditi kimia OT, SK, Kosmetik dan Pangan. Sehingga semua sumber daya yang dibutuhkan untuk

pengujian seperti instrument, suku cadang, reagensia dan baku pembanding harus di sediakan oleh Balai POM di Bengkulu.

Sesudah diterapkannya regionalisasi tahun 2022, Balai POM di Bengkulu menjadi Balai anggota regional Padang. Tapi sejak 2023 regional Padang berubah menjadi regional Medan dengan BBPOM Medan sebagai Laboratorium Regional nya. Untuk pengujian di Balai POM Bengkulu setelah regionalisasi dapat dilihat di tabel berikut,

Tahun	Obat	OT, Obat Kuasi, SK	Kosmetik	Pangan	Biologi
2022	Kelas terapi kardiovaskuler Lain-lain Organ sensoris	Pengujian dasar	Pengujian dasar Pengujian spesifik pengujian (PK Dioksan sampel dari BPOM di Bengkulu dan BBPOM di Medan)	Pengujian dasar Pengujian spesifik (Bahan Kontak Pangan dan BTP Khusus)	Pengujian dasar untuk seluruh komoditi kecuali produk obat sesuai dengan pembagian kelas terapi, dan pengujian spesifik (DNA pada Produk Obat)
2023	Kelas terapi kardiovaskuler Lain-lain Organ sensoris	Pengujian dasar (yang menggunakan HPLC, GC, AAS dan GCMS)	Pengujian dasar (yang menggunakan HPLC, GC, AAS, dan GCMS)	Pengujian dasar Pengujian spesifik (Bahan Kontak Pangan dan BTP Khusus)	pengujian dasar untuk seluruh komoditi kecuali untuk produk obat sesuai dengan pembagian kelas terapi

Tahun	Obat	OT, Obat Kuasi, SK	Kosmetik	Pangan	Biologi
2024	Kelas terapi kardiovaskuler Lain-lain Organ sensoris	Pengujian dasar (yang menggunakan HPLC, GC, AAS dan GCMS)	Pengujian dasar (yang menggunakan HPLC, GC, AAS dan GCMS)	Pengujian dasar Pengujian spesifik (Bahan Kontak Pangan dan BTP Khusus)	pengujian dasar untuk seluruh komoditi kecuali untuk produk obat sesuai dengan pembagian kelas terapi
2025	Kelas terapi kardiovaskuler Lain-lain Organ sensoris	Pengujian dasar (yang menggunakan HPLC, GC, AAS dan GCMS)	Pengujian dasar (yang menggunakan HPLC, GC, AAS dan GCMS)	Pengujian dasar Pengujian spesifik (Bahan Kontak Pangan dan BTP Khusus)	pengujian dasar untuk seluruh komoditi kecuali untuk produk obat sesuai dengan pembagian kelas terapi

Setelah diberlakukannya regionalisasi laboratorium, sumber daya yang dibutuhkan Balai POM di Bengkulu untuk pengujian seperti instrument, suku cadang, reagensia dan baku pembanding yang disediakan hanya yang sesuai dengan penugasan regionalnya.

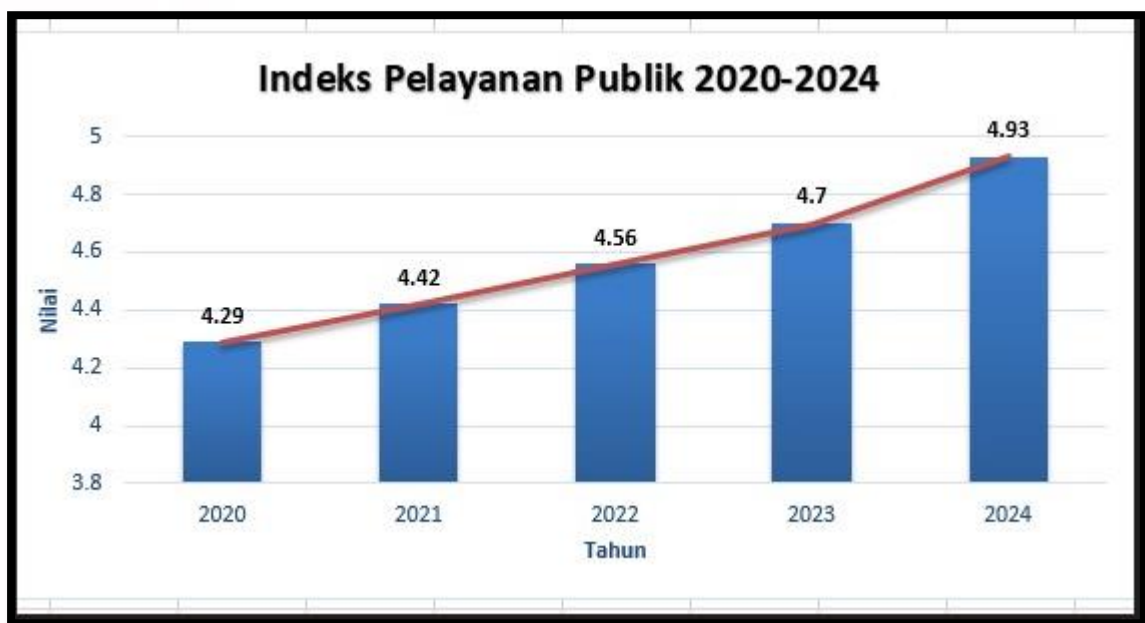
6. Infrastruktur Pelayanan Publik yang Memenuhi Standar

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Bengkulu dalam melakukan pelayanan publik bagi masyarakat Balai POM di Bengkulu telah menyiapkan sarana prasarana terkait dengan pelayanan publik pada gedung kantor yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara Bengkulu dan Jalan Batanghari, dengan seluruh kepemilikan berstatus hak pakai atas nama Pemerintah RI cq. Badan POM RI.

Sarana operasional mencakup gedung laboratorium, kantor utama, gudang reagen, serta bangunan untuk substansi Penindakan, Pemeriksaan, dan Arsip.

Melalui optimalisasi fasilitas ini, Balai POM di Bengkulu menunjukkan dedikasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan memberikan layanan publik yang prima dan inklusif.

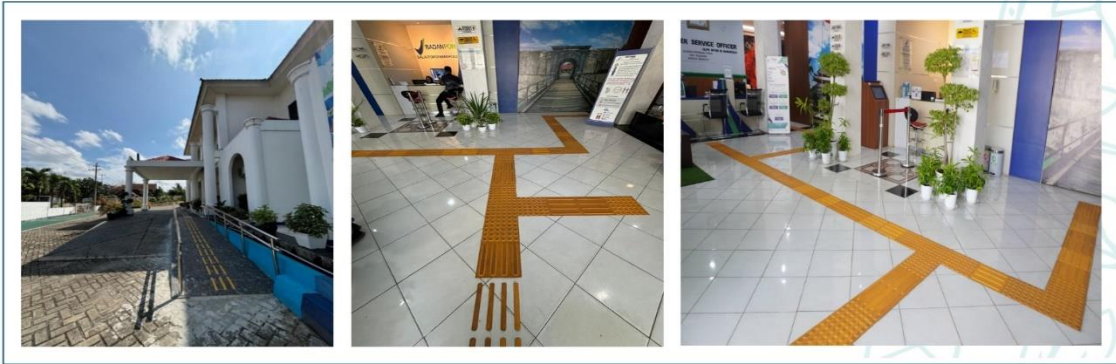
Terdapat peningkatan Indeks Pelayanan Publik selama periode 2020-2024 sebagai berikut



Gambar 1.19 Nilai Indeks Pelayanan Publik 2020-2024

Sebagai bentuk implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), fasilitas pelayanan publik dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan semua kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan. Hal ini di buktikan didasarkan pada lembar hasil pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan tahun 2024 dari Kementrian PAN-RB dimana Balai POM di Bengkulu mendapatkan skor sebesar 98,02% dengan kategori terbaik. Penilaian mencakup aspek antara lain Kebijakan dan kepemimpinan, aspek aksesibilitas fisik (jalur pemandu , area parker khusus, jalan landai, area prioritas, toilet disabilitas, loket prioritas, area ramah anak, alat bantu mobilitas, dan ruang tenang), aspek aksesibilitas informasi dan komunikasi, aspek akomodasi yang layak dan aspek sumberdaya manusia.

1. Jalur Pemandu / Guiding Block

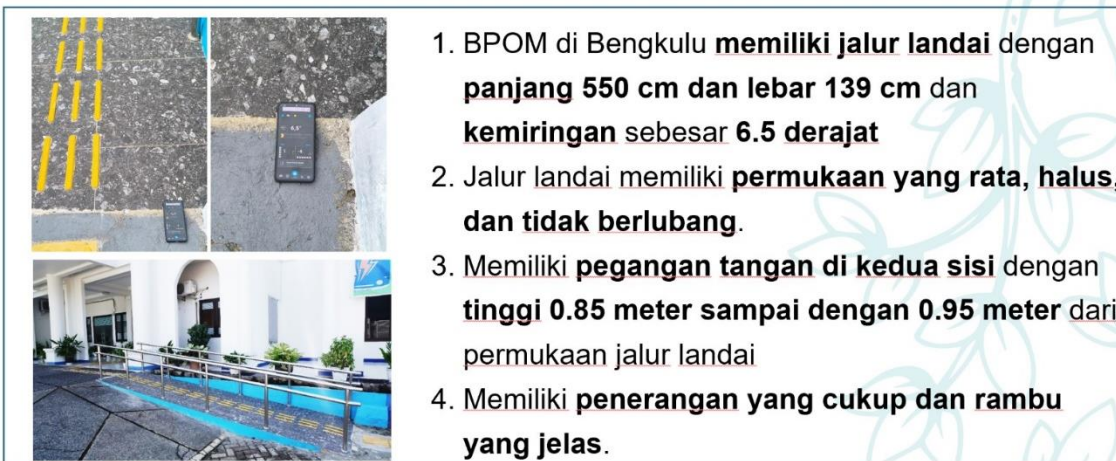


2. Area Parkir Khusus



1. Dekat dengan Bangunan Gedung Pelayanan
(19.8 m dari parkir mobil & 31.8 m dari parkir motor)
1. Memiliki Ruang bebas bagi pengguna kursi roda
2. Simbol tanda rambu berwarna kontras (Parkir penyandang disabilitas berwarna Biru)
3. Memiliki Lebar 285 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda Terhubung dengan ram/jalan menuju bangunan utama
4. Area Parkir Permukaan Datar

3. Jalur Landai



1. BPOM di Bengkulu memiliki jalur landai dengan panjang 550 cm dan lebar 139 cm dan kemiringan sebesar 6.5 derajat
2. Jalur landai memiliki permukaan yang rata, halus, dan tidak berlubang.
3. Memiliki pegangan tangan di kedua sisi dengan tinggi 0.85 meter sampai dengan 0.95 meter dari permukaan jalur landai
4. Memiliki penerangan yang cukup dan rambu yang jelas.

4. Area Prioritas / Ruang Tunggu Prioritas



1. BPOM di Bengkulu memiliki ruang tunggu atau area prioritas dengan luas 325 cm dan lebar 207 cm.
2. Pada ruang tunggu tersedia kursi yang nyaman, meja dan tempat sampah
3. Ruang tunggu memiliki penerangan yang cukup dan ventilasi yang baik dengan tersedianya AC dan jendela.
4. Memiliki tanda atau simbol yang mudah dikenali dan terlihat dari jarak minimal 10 meter
5. Ruang tunggu BPOM di Bengkulu terletak pada lokasi yang mudah dan aman dijangkau.

5. Toilet Disabilitas



1. Memiliki tanda atau simbol yang mudah dikenali dan terlihat dari jarak minimal 10 meter. (Tersedia penanda dalam huruf braille yang dapat diraba oleh tuna netra) Toilet disabilitas
1. BPOM di Bengkulu memiliki luas 4 meter persegi
2. Ruang gerak untuk pengguna kursi roda berputar 360 derajat dengan diameter minimal 1,5 meter.
3. Pintu geser dilengkapi kunci slot yang mudah dibuka jika terjadi kondisi darurat.
4. Telah tersedia kloset duduk pada toilet untuk disabilitas atau kelompok rentan dengan tinggi 40 cm dari permukaan lantai.
5. Telah tersedia pegangan tangan pada sisi toilet untuk disabilitas atau kelompok rentan dengan tinggi 80 cm dari permukaan lantai.
6. Telah tersedia wastafel pada toilet untuk disabilitas atau kelompok rentan dengan tinggi 80 cm dari permukaan lantai, dilengkapi dengan keran air otomatis sensor untuk memudahkan kelompok rentan dalam menggunakannya.
7. Telah tersedia cermin pada toilet untuk disabilitas atau kelompok rentan dengan tinggi 160 cm dari permukaan lantai.
8. Telah tersedia fasilitas pada toilet prioritas untuk disabilitas atau kelompok rentan, seperti sabun, tisu juga dilengkapi dengan pembalut, diapers dewasa, toilet duduk untuk anak dan kelengkapan kerapian kelompok rentan (sisir, sikat gigi sekali pakai).
9. Telah tersedia panic button yang mudah dijangkau apabila terjadi keadaan darurat
10. Penerangan yang cukup dan ventilasi yang baik.

8. Area Ramah Anak / Are Bermain Anak



1. BPOM di Bengkulu memiliki fasilitas area ramah anak antara lain: Ruang bermain anak dengan luas 10.4 meter persegi dengan panjang 520 cm dan lebar 200 cm dan Ruang daycare anak dengan luas 33.9 meter persegi dengan panjang 685 cm dan 495 cm.
2. Area ramah anak terletak pada permukaan yang rata, halus, tidak licin dan dilengkapi dengan pembatas serta posisi jauh dari jendela dan tangga sehingga tidak berbahaya
3. Pada ruang bermain anak tersedia mainan antara lain kuda-kudaan, meja, boneka, beanbag, kursi anak, buku edukasi dan buku cerita anak.
4. Penerangan area anak memiliki pencahayaan yang baik dan tersedia pendingin ruangan (AC) pada ruangan bermain anak.
5. Tanda/symbol mudah dikenali dan terlihat dari jarak minimal 10 meter
6. Area ramah anak terletak pada ruang pelayanan sehingga mudah dijangkau, dan berada di pojok ruang pelayanan sehingga tidak mengganggu mobilitas pengguna layanan lainnya.
7. Terdapat monitoring evaluasi kebersihan di tempat bermain anak untuk menjaga area bermain anak tetap bersih, higienis, dan steril.
8. Area Bermain Anak dilengkapi dengan CCTV



Balai POM di Bengkulu juga menyelenggarakan pelayanan publik secara on line di 4 (empat) Mall Pelayanan Publik (MPP) yaitu di kota Bengkulu, di Kabupaten Bengkulu Tengah, di Kabupaten Bengkulu Utara dan di Kabupaten Seluma dalam rangka memperluas cakupan pelayanan publik bagi masyarakat.

Dalam perjalanannya pada tahun 2025 Mall Pelayanan Publik Balai POM di Bengkulu dilaksanakan melalui zoom ruang virtual yang langsung terhubung oleh resepsionis Balai POM di Bengkulu.

1.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan yang terus meningkat, Balai POM di Bengkulu tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai

POM di Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Bengkulu dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk Obat dan Makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai POM di Bengkulu, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan Sumber Daya untuk Mengawasi seluruh Sarana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM Bengkulu

Kelemahan utama Balai POM di Bengkulu adalah ketergantungan yang tinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memengaruhi kinerja operasional secara keseluruhan. Kebijakan pemotongan anggaran, seperti pemblokiran dana untuk perjalanan dinas, secara langsung membatasi cakupan wilayah dan jumlah sarana produksi maupun distribusi yang dapat diperiksa secara langsung.

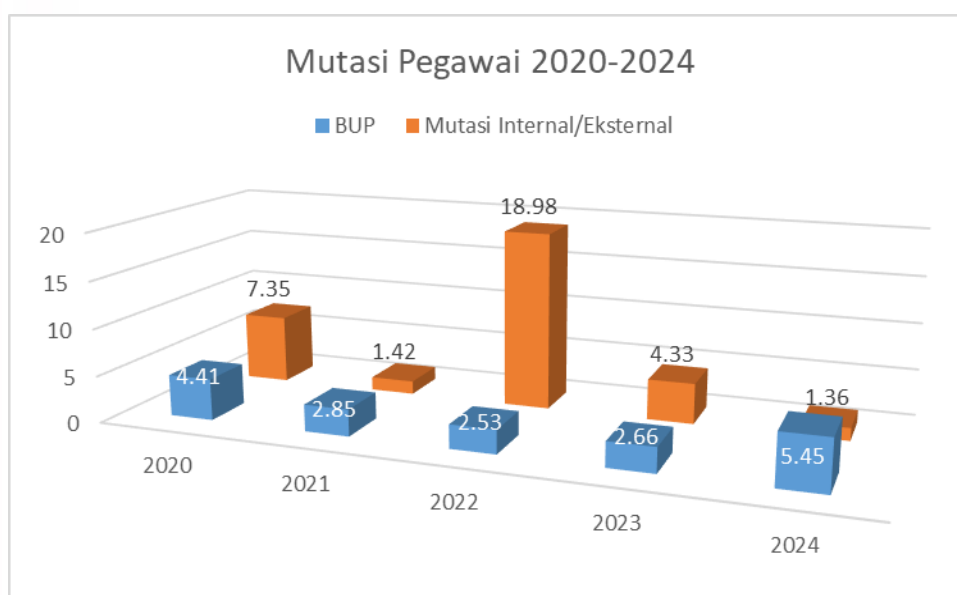
Keterbatasan anggaran ini berdampak signifikan pada beberapa area:

- a. **Laboratorium Pengujian:** Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium sangat mahal, sementara anggaran yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan tidak adanya peremajaan alat yang sudah tua dan rusak, seperti *microwave* dan HPLC. Akibatnya, Balai POM belum bisa menguji beberapa parameter, terutama dalam kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) keracunan pangan, sehingga pengujian harus dilakukan di laboratorium lain. Anggaran untuk reagen sampel juga terbatas, menghambat pencapaian target pengujian.
- b. **Pengawasan Lapangan:** Keterbatasan anggaran membatasi cakupan pengawasan dan pendampingan UMKM ke daerah-daerah terpencil, karena biaya dan waktu yang dibutuhkan menjadi lebih besar.
- c. **Manajemen Internal:** Keterbatasan anggaran juga membatasi beberapa kegiatan dan menimbulkan tekanan pada sumber daya manusia. Kurangnya anggaran untuk tindak lanjut observasi setelah pemberian *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) juga menghambat tercapainya target.

Balai POM di Bengkulu mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dimulai pembangunannya pada tahun 2021. Pada tahun 2023 dilakukan perbaikan dan penyusunan standar Teknis sehingga di Bulan Januari tahun 2024 telah diperoleh Persetujuan Teknis (PERTEK) untuk pengoperasian IPAL dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan telah mendapatkan Surat Layak Operasi (SLO) pada bulan Juli 2024. Saat ini, Balai POM di Bengkulu sedang memproses Persetujuan Teknis TPS B3 dan Izin UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

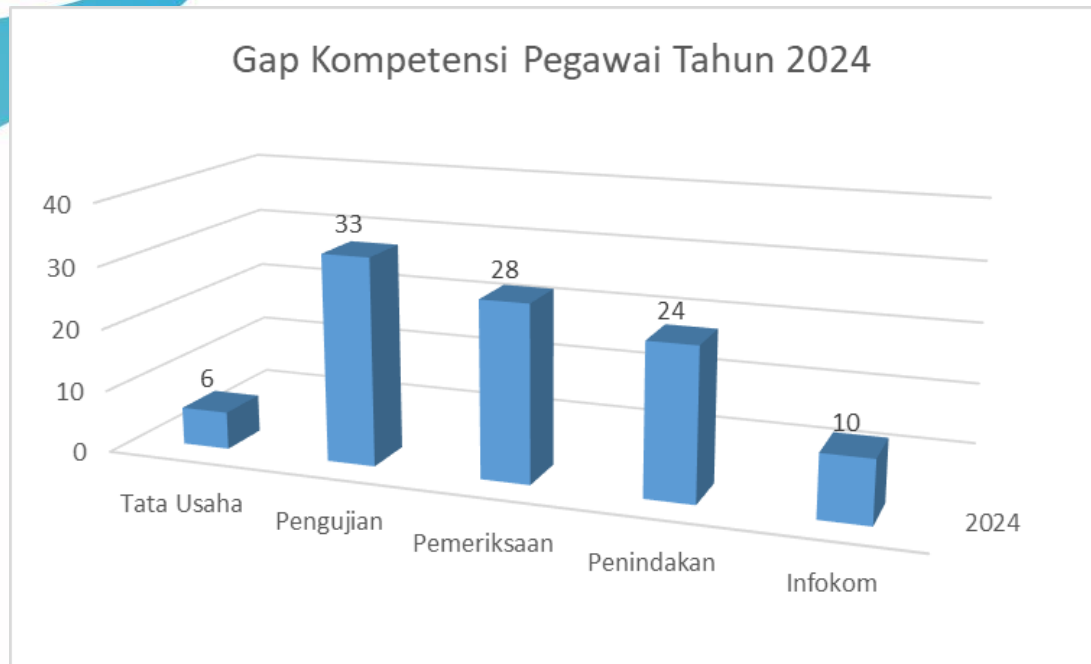
a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam kurun waktu 2020-2024 terdapat rotasi mutasi pegawai baik disebabkan batas usia pensiun, mutasi antar satuan kerja maupun mutasi internal sebagai berikut :



Pada tahun 2022 terdapat mutasi paling tinggi (18.98%) disebabkan adanya penerimaan CPNS dengan jumlah 13 orang, sedangkan pada tahun 2024 terdapat pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BPU) sebesar 5.47% disebabkan terdapat 4 pegawai yang memasuki masa pensiun.

Dilihat dari Gap kompetensi pegawai sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :



Kesenjangan terbesar pada substansi pengujian disebabkan oleh masuknya sejumlah pegawai baru, baik dari mutasi internal maupun pengangkatan terbaru, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk menuju laboratorium Green laboratory, membutuhkan SDM yang berkompeten dan menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab sebagai berikut :

- Edukasi dan Kesadaran: Setiap individu, dari teknisi, peneliti, hingga manajer lab, harus memiliki pemahaman mendalam tentang praktik ramah lingkungan. Pelatihan berkelanjutan tentang pengelolaan limbah yang benar, penggunaan alat hemat energi, dan prosedur yang efisien sangat penting.
- Komitmen dan Partisipasi: SDM harus memiliki komitmen kuat untuk menerapkan praktik hijau dalam rutinitas harian mereka. Hal ini mencakup mematikan alat yang tidak digunakan, melaporkan kebocoran air, dan memisahkan limbah dengan benar.
- Inovasi: Mendorong SDM untuk mencari cara-cara baru yang lebih ramah lingkungan dalam melakukan penelitian, seperti menggunakan metode yang lebih efisien atau mengganti bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman.

2. Belum Berhasil Mendapatkan Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Disebabkan belum Optimalnya Lingkungan Pengendalian.

Balai POM di Bengkulu hingga saat ini belum berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Salah satu faktor utama yang memengaruhi hal tersebut adalah belum optimalnya penerapan lingkungan pengendalian di internal organisasi. Lingkungan pengendalian yang belum sepenuhnya kuat berdampak pada belum maksimalnya implementasi budaya kerja berintegritas, konsistensi pengawasan, serta efektivitas pengendalian risiko pada seluruh proses layanan dan manajemen.

Ketidaktercapaian ini menjadi evaluasi penting bagi Balai POM Bengkulu untuk memperkuat komitmen dalam pembangunan Zona Integritas. Upaya perbaikan akan diarahkan pada peningkatan kepatuhan terhadap standar operasional, penguatan pengawasan internal, transparansi layanan, serta penanaman nilai integritas di seluruh level pegawai. Dengan memperkuat lingkungan pengendalian, diharapkan Balai POM Bengkulu mampu meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik, sehingga dapat memenuhi kriteria dan meraih predikat WBK pada periode berikutnya.

Lingkungan pengendalian di Balai POM Bengkulu belum berjalan secara optimal, ditandai dengan belum adanya mekanisme yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap disiplin, kode etik, kode perilaku, serta pencegahan fraud. Kondisi ini berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran yang dapat mempengaruhi integritas dan akuntabilitas organisasi sehingga sampai pada tahun 2024 Balai POM di Bengkulu belum berhasil meraih WBK.

1.2.3. Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Bengkulu untuk memposisikan dirinya sebagai organisasi pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Bengkulu untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

Dalam analisis SWOT terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Balai POM di Bengkulu, khususnya dalam jaminan keamanan obat dan makanan, peluang (opportunity) yang dapat diidentifikasi meliputi

1. Pengembangan Produk Lokal Khas Bengkulu yang Potensial

Provinsi Bengkulu dikenal dengan kekayaan produk lokal khasnya seperti kopi robusta, olahan buah salak, minyak atsiri, tepung pisang enggano dan berbagai olahan pangan tradisional yang memiliki potensi besar di pasar regional maupun nasional. Pengembangan produk-produk lokal ini membuka peluang strategis bagi Balai POM Bengkulu untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan keamanan obat serta makanan. Dengan melakukan sertifikasi dan pengawasan mutu yang ketat, Balai POM dapat memastikan bahwa produk lokal seperti kopi Bengkulu dan hasil olahan makanan tradisional memenuhi standar keamanan yang berlaku, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar. Selain itu, Balai POM dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha UMKM untuk memberikan pelatihan dan edukasi terkait keamanan pangan dan produksi yang higienis. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan memperkuat posisi Bengkulu sebagai produsen produk lokal berkualitas di Indonesia. Dalam upaya mendukung **pengembangan produk lokal yang aman dan berkualitas** di Provinsi Bengkulu, Balai POM memiliki peluang strategis melalui meningkatnya **permintaan uji laboratorium dari pelaku UMKM**. Seiring bertumbuhnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya standar keamanan produk serta dorongan dari pemerintah daerah untuk mendorong legalitas dan daya saing produk lokal seperti kopi robusta, olahan pangan tradisional, dan minyak atsiri, banyak UMKM mulai mengakses layanan uji mutu untuk mendapatkan izin edar atau sertifikasi. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, tetapi juga membuka ruang bagi Balai POM Bengkulu untuk memperluas fungsi pembinaan teknis dan pengawasan preventif. Dengan memfasilitasi layanan pengujian yang terjangkau dan edukasi yang tepat sasaran, Balai POM berperan penting dalam memastikan bahwa produk lokal Bengkulu aman dikonsumsi dan siap bersaing di pasar nasional maupun ekspor.

2. Peningkatan Kolaborasi Melalui Jejaring Laboratorium

Kini, dengan adanya sistem regionalisasi laboratorium untuk komoditas obat, Balai POM di Bengkulu memiliki peluang besar untuk meningkatkan kinerja pengujiannya secara efisien. Sistem ini memungkinkan Balai untuk mengalokasikan sumber daya pengujian secara lebih efektif, sehingga dapat memperkuat kinerja pengujian dan mengurangi beban biaya operasional.

a. Peningkatan Kolaborasi Melalui Jejaring Laboratorium

Sejalan dengan strategi nasional BPOM, Balai POM di Bengkulu dapat memanfaatkan jejaring laboratorium untuk mengoptimalkan pengawasan. Contohnya, Balai POM dapat berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) terkait metode uji beberapa parameter yang belum dapat diuji di Bengkulu. Selain itu, jejaring laboratorium juga dapat digunakan untuk berbagi sumber daya pengujian dan meningkatkan kompetensi penguji melalui pelatihan bersama.

b. Dampak Terhadap Kinerja dan Efisiensi

Dengan adanya jejaring laboratorium, Balai POM di Bengkulu dapat mengatasi kelemahan internalnya, seperti keterbatasan peralatan pengujian modern dan anggaran yang terbatas. Jejaring ini dapat memastikan bahwa semua sampel dapat diuji sesuai standar, meskipun Balai tidak memiliki semua peralatan yang dibutuhkan. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan kecepatan pengujian, tetapi juga mendukung pencapaian target strategis Balai, seperti meningkatkan persentase sediaan farmasi yang aman dan bermutu.

c. Strategi Adaptasi Terkini

Balai POM di Bengkulu saat ini berupaya mengadaptasi dirinya dengan kondisi jejaring laboratorium yang ada. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan membuat pembagian jadwal penggunaan alat antara laboratorium obat tradisional dan kosmetik, serta merencanakan pengadaan reagen yang tepat waktu untuk mengoptimalkan kinerja pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa Balai secara proaktif memanfaatkan peluang kolaborasi untuk mengatasi tantangan internalnya.

3. Alokasi Dana DAK NF BPOM untuk Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu

Peluang Peningkatan Pengawasan Mutu Obat dan Makanan Melalui DAK Non Fisik POM

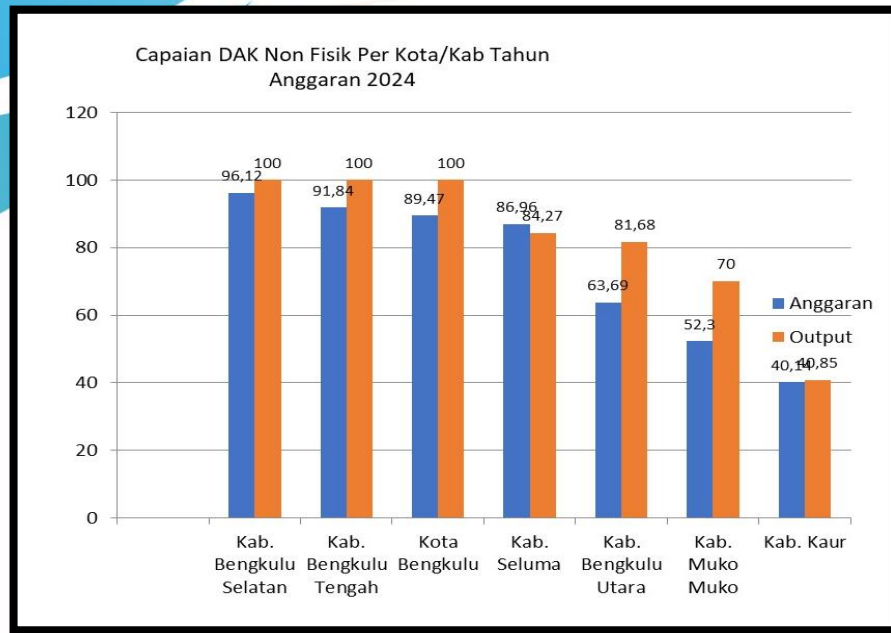
Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Pengawasan Obat dan Makanan (POM) yang disalurkan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu merupakan peluang strategis yang sangat berharga untuk memperkuat ekosistem perlindungan kesehatan masyarakat. Peluang ini datang di tengah tantangan keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi oleh BPOM dan pemerintah daerah.

1. Peningkatan Kapasitas Pengawasan Daerah

DAK Non Fisik POM dirancang untuk membiayai kegiatan-kegiatan non-infrastruktur, yang berarti dana ini dapat langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pengawasan di tingkat kabupaten/kota. Dana ini memungkinkan Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan operasional yang selama ini terhambat oleh keterbatasan APBD Peningkatan frekuensi inspeksi dan surveilans ke sarana-sarana IRTP dan sarana pelayanan kefarmasian di Kabupaten / Kota yang menjadi wilayah kerja Balai POM di Bengkulu.

2. Sinergi dan Kolaborasi yang Lebih Kuat

Alokasi DAK Non Fisik ini memaksa dan memfasilitasi sinergi yang lebih erat antara BPOM Bengkulu dengan Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). DAK Non Fisik dapat digunakan untuk melaksanakan program antara lain pengawasan pemenuhan komitmen SP-PIRT melalui Bimtek PKP dan Pengawasan Sarana Produksi, Pengawasan Post Market berupa sampling dan pengujian, Pengawasan sarana produksi yang sudah memenuhi komitmen, serta pengawasan apotek dan toko obat



Gambar 1.20 Capaian DAK DAK Non Fisik Balai POM di Bengkulu

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Efisiensi Pengawasan

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan peluang besar bagi Balai POM di Bengkulu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasannya, sejalan dengan agenda transformasi digital nasional. Dengan mengoptimalkan teknologi yang sudah ada dan mengadopsi inovasi baru, Balai POM dapat mengatasi beberapa kelemahan internal dan memperkuat posisinya sebagai lembaga pengawas yang modern dan responsif.

a. Optimalisasi Proses Internal

Balai POM di Bengkulu memiliki peluang untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi internal yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi operasional. Aplikasi seperti SIPT (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu) dan DIKOLABORASI memungkinkan digitalisasi pencatatan penggunaan dan riwayat pemeliharaan alat laboratorium. Digitalisasi ini dapat meningkatkan akurasi data dan pengelolaan aset, yang sangat penting untuk mengatasi kelemahan terkait peralatan yang menua. Dengan data yang lebih akurat, Balai POM dapat melakukan perencanaan pemeliharaan yang lebih proaktif dan pengajuan pengadaan alat baru yang lebih terukur, sehingga dapat membantu mengatasi kendala anggaran yang terbatas.

b. Peningkatan Layanan dan Pengawasan Daring

Perkembangan teknologi pengawasan dan perizinan digital membuka kesempatan untuk modernisasi layanan publik. Aplikasi seperti OSS-RBA, e-PPIRT, dan E-Sertifikasi mempermudah proses pengajuan izin bagi pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan dan mempercepat legalitas produk UMKM. Selain itu, Balai POM dapat mengadopsi teknologi intelijen digital, seperti *data analytics* dan alat OSINT, untuk memperkuat investigasi dan pengawasan daring. Pemanfaatan platform digital seperti *marketplace* dan media sosial juga menjadi saluran yang efektif untuk edukasi dan pengawasan produk ilegal, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat.

Meski demikian, peluang ini harus diimbangi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan internal. Kesenjangan kompetensi SDM dalam pemanfaatan teknologi digital, serta infrastruktur internet yang belum optimal di beberapa daerah, menjadi tantangan yang perlu ditangani untuk mewujudkan potensi penuh dari digitalisasi ini.

5. Perubahan Presepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik UPT

Perubahan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di BPOM Bengkulu menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dan apresiasi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Seiring dengan berbagai upaya perbaikan dan inovasi yang dilakukan, masyarakat mulai merasakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Proses pelayanan yang sebelumnya dianggap rumit dan memakan waktu kini dinilai lebih sederhana, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Peningkatan kualitas sarana prasarana, penerapan pelayanan berbasis digital, serta sikap petugas yang lebih ramah dan profesional turut memperkuat persepsi positif masyarakat. Berbagai saluran informasi dan pengaduan yang mudah diakses juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perbaikan layanan, sehingga tercipta hubungan yang lebih terbuka dan akuntabel antara UPT dan pengguna layanan.

Perubahan persepsi ini menjadi indikator keberhasilan UPT dalam melaksanakan transformasi pelayanan publik. Tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi

juga membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dengan komitmen yang konsisten, UPT diharapkan dapat terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga persepsi positif masyarakat dapat terpelihara secara berkelanjutan..

6. Pertumbuhan Pasar dan Perdagangan Digital (E-commerce):

Pertumbuhan pesat pasar dan perdagangan digital (e-commerce) di Provinsi Bengkulu membuka peluang strategis bagi Balai POM untuk memperluas pengawasan dan edukasi keamanan obat serta makanan yang beredar secara online. Dengan semakin banyaknya konsumen yang berbelanja melalui platform digital, Balai POM dapat mengembangkan sistem monitoring dan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan digital, termasuk penanganan produk ilegal atau tidak aman yang berpotensi masuk ke pasar. Namun, pertumbuhan ini juga disertai dengan ancaman kejahatan cyber seperti penipuan online, peredaran obat palsu melalui platform digital, dan manipulasi data produk yang dapat mengganggu efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, Balai POM perlu memperkuat kapasitas teknologi dan kerja sama lintas sektor untuk menghadapi tantangan tersebut, sekaligus memanfaatkan teknologi digital dalam kampanye edukasi yang lebih luas dan interaktif, mendukung pelaksanaan tupoksi dalam menjamin keamanan produk obat dan pangan di era perdagangan modern

7. Dukungan dari Media dan Influencer Lokal

Dukungan dari media massa dan influencer lokal di Provinsi Bengkulu merupakan peluang strategis bagi Balai POM dalam mengoptimalkan pelaksanaan tupoksinya, khususnya dalam edukasi dan penyebaran informasi terkait keamanan obat dan makanan. Keberadaan media lokal—baik cetak, elektronik, maupun digital—memungkinkan penyampaian informasi yang cepat, luas, dan sesuai dengan konteks budaya masyarakat Bengkulu. Selain itu, influencer lokal yang memiliki kedekatan emosional dan pengaruh terhadap komunitasnya dapat menjadi mitra efektif dalam kampanye edukatif, seperti gerakan “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa), pencegahan penggunaan obat ilegal, serta promosi produk pangan yang aman dan sehat. Melalui narasi yang komunikatif dan gaya penyampaian yang sesuai dengan target audiens, kolaborasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi

masyarakat secara signifikan. Balai POM Bengkulu juga dapat menjalin kemitraan berkelanjutan dengan media untuk peliputan kegiatan pengawasan dan advokasi kebijakan, sehingga memperkuat citra lembaga sebagai pelindung masyarakat dalam bidang keamanan obat dan makanan di Provinsi Bengkulu.

1.1.2. Ancaman (*Threat*)

Dalam menjalankan tugasnya, Balai POM di Bengkulu menghadapi berbagai ancaman eksternal yang kompleks dan dinamis. Ancaman ini berasal dari perubahan teknologi, pasar, dan perilaku konsumen yang dapat menghambat upaya Balai POM di Bengkulu dalam melindungi kesehatan masyarakat. Mengidentifikasi dan memahami ancaman ini sangat penting untuk menyusun strategi yang adaptif dan responsif.

1. Peredaran Produk Ilegal, Palsu dan Tidak Terdaftar

Dalam menjalankan tugasnya, Balai POM di Bengkulu menghadapi ancaman signifikan berupa maraknya peredaran produk ilegal, palsu dan tidak terdaftar. Produk-produk ini, yang mencakup makanan, obat, kosmetik, suplemen, dan bahan berbahaya lainnya, beredar tanpa memiliki izin edar resmi dan tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang ditetapkan. Ancaman ini didorong oleh beberapa faktor: letak geografis Bengkulu yang memiliki akses distribusi terbuka, seperti pelabuhan dan jalur darat, yang memudahkan masuknya produk ilegal. Selain itu, keterbatasan SDM pengawas, fasilitas laboratorium, dan sarana operasional di wilayah terpencil juga memperlemah kapasitas pengawasan. Ancaman ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat yang mudah tergiur oleh harga murah atau klaim berlebihan. Perkembangan platform digital seperti e-commerce dan media sosial juga menjadi saluran baru yang sulit diawasi secara konvensional. Pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, juga sering memproduksi barang tanpa izin karena minimnya pemahaman atau keengganan untuk mengikuti prosedur perizinan. Lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya sanksi tegas juga menjadi tantangan. Dampak dari ancaman ini tidak hanya berisiko pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Balai POM di Bengkulu dan menghambat pencapaian tujuan strategis kelembagaan. Oleh karena itu, peredaran produk ilegal ini harus menjadi

fokus utama mitigasi melalui peningkatan pengawasan, edukasi, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital.

Dalam era revolusi sosial (society 5.0), e-commerce telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, termasuk dalam pembelian obat dan makanan. Kemudahan akses ini, meskipun menguntungkan, membawa risiko signifikan berupa kejahatan siber di bidang obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh BPOM.

Platform e-commerce yang menggunakan sistem user-generated content (UGC) mempermudah pengguna untuk menjual produk ilegal, termasuk produk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Ancaman ini tidak hanya berupa penipuan daring, tetapi juga penjualan produk yang melanggar hukum. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Balai POM di Bengkulu, yang tidak hanya harus mengawasi produk lokal tetapi juga produk impor. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi produk ilegal yang tepat dan penegakan hukum yang kuat. Jika tidak ditangani dengan baik, risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan kemudahan akses konsumen terhadap produk ilegal melalui e-commerce. Balai POM di Bengkulu menghadapi tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber ini

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat Terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Masih Rendah

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Bengkulu terhadap pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan memenuhi ketentuan masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Minimnya pengetahuan mengenai cara mengenali produk berizin edar, membaca label, membedakan produk asli dan palsu, serta memahami risiko produk ilegal membuat masyarakat rentan menjadi target peredaran obat dan pangan olahan yang tidak memenuhi standar.

Kondisi ini diperburuk oleh maraknya penjualan produk ilegal melalui pasar tradisional maupun platform digital, di mana masyarakat sering tergiur oleh harga murah tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu. Kurangnya perhatian terhadap

informasi pada kemasan, seperti tanggal kedaluwarsa, izin edar, komposisi, dan klaim manfaat, meningkatkan risiko konsumsi produk yang dapat membahayakan kesehatan.

Situasi ini menegaskan perlunya intensifikasi edukasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun masyarakat Bengkulu yang lebih kritis, peduli, dan mampu melindungi diri dari risiko sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal.

hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator indeks kesadaran masyarakat dalam kurun waktu 3 terakhir (2022- 2024) masih dibawah target yang ditetapkan (belum 100%).

3. Pengurangan Anggaran

Pengurangan anggaran yang ditujukan untuk fungsi Penindakan (Penegakan Hukum) dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Balai POM Bengkulu menciptakan ancaman ganda yang berpotensi melumpuhkan upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan berbahaya.

1. Pelumpuhan Efek Jera (Penindakan)

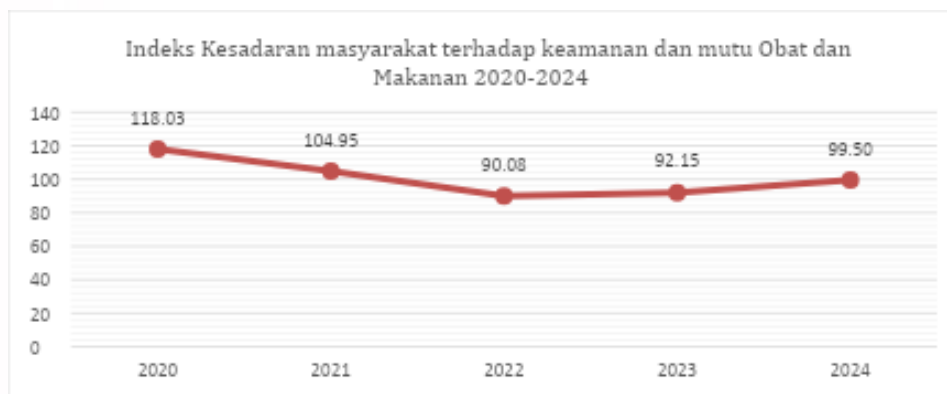
Anggaran penindakan sangat vital untuk memastikan adanya efek jera terhadap pelaku kejahatan obat dan makanan. Pemotongan dana ini secara langsung menghambat proses penegakan hukum, mulai dari investigasi hingga penyerahan berkas perkara. Pengurangan Anggaran membatasi kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Bengkulu untuk melakukan penyidikan mendalam (pengintaian, pengumpulan bukti, dan operasi tangkap tangan) yang seringkali membutuhkan biaya operasional yang tidak terduga dan cepat. Terhambatnya proses hukum dikarenakan biaya untuk koordinasi intensif dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan, serta pembiayaan barang bukti dan saksi ahli, akan sulit dipenuhi. Akibatnya, proses penyerahan dan penuntutan perkara menjadi lambat atau bahkan tertunda.

2. Penurunan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) adalah alat pencegahan utama BPOM. KIE bertujuan meningkatkan literasi masyarakat agar mereka menjadi konsumen cerdas yang mampu membedakan produk aman dan ilegal.

Pengurangan anggaran KIE berarti Balai POM tidak dapat lagi menggelar sosialisasi, seminar, atau penyebaran materi edukasi secara masif. Ini secara langsung menyebabkan penurunan kesadaran masyarakat mengenai risiko bahaya obat dan makanan tanpa izin edar. Program edukasi penting seperti pemberdayaan komunitas, edukasi di sekolah-sekolah tentang pangan jajanan anak sekolah (PJAS), atau pembinaan UMKM pangan menjadi terbatas. Akibatnya, kelompok rentan seperti anak-anak dan pelaku UMKM kehilangan akses terhadap informasi penting yang dapat mencegah kerugian kesehatan dan ekonomi.

hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator indeks kesadaran masyarakat dalam kurun waktu 3 terakhir (2022- 2024) masih dibawah target yang ditetapkan (belum 100%).



Gambar 1.21 Trend Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan 2020-2024

4. Insiden Terjadinya KLB KP Meningkat

Pada tahun ini, Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan signifikan dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. Tercatat dua insiden KLB KP dengan jumlah korban yang cukup besar. Kejadian pertama terjadi di Kelurahan Padang Serai, Kota Bengkulu, pada sebuah acara pengajian warga, yang menyebabkan lebih dari 50 orang mengalami gejala keracunan pangan. Kejadian kedua terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dengan jumlah korban lebih dari 400 orang.

Berdasarkan hasil penelusuran, kedua kejadian tersebut dipicu oleh proses pengolahan makanan yang tidak tepat, termasuk praktik higiene dan sanitasi yang tidak memadai serta penanganan bahan baku dan makanan jadi yang tidak aman. Peningkatan jumlah

kasus ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan keamanan pangan, pembinaan kepada pelaku usaha dan penjamah pangan, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

5. Perubahan Perilaku Konsumen

Perubahan perilaku konsumen di era digital saat ini menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi oleh BPOM di Bengkulu dalam lima tahun ke depan. Masyarakat kini semakin terbiasa melakukan pembelian produk melalui platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan marketplace, di mana pengawasan terhadap legalitas dan keamanan produk relatif lebih sulit dilakukan dibandingkan jalur distribusi konvensional. Konsumen juga semakin tertarik pada produk yang menawarkan kepraktisan, hasil instan, dan harga murah, tanpa mempertimbangkan aspek legalitas atau keamanan produk tersebut.

Hal ini menyebabkan produk ilegal, tidak terdaftar, atau mengandung bahan berbahaya semakin mudah masuk ke pasar konsumen. Di sisi lain, tren penggunaan produk alami, herbal, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sedang naik daun juga menimbulkan tantangan tersendiri, karena banyak dari produk tersebut diproduksi oleh pelaku usaha kecil tanpa melalui proses registrasi di BPOM.

Perubahan perilaku konsumen ini diperparah oleh rendahnya literasi masyarakat terkait cara memverifikasi izin edar suatu produk dan masih minimnya budaya "cek KLIK" (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa). Selain itu, penyebaran informasi yang tidak valid atau hoaks terkait produk kesehatan di media sosial turut membentuk opini publik yang keliru, dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap produk legal yang telah melalui pengawasan BPOM. Jika tidak ditangani secara komprehensif, perubahan perilaku konsumen ini berpotensi meningkatkan risiko konsumsi produk berbahaya, menghambat efektivitas pengawasan, serta melemahkan peran BPOM sebagai lembaga perlindungan konsumen. Oleh karena itu, BPOM di Bengkulu perlu merumuskan strategi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perilaku konsumen, termasuk memperkuat literasi publik, pengawasan digital, serta kolaborasi dengan platform distribusi online.

Tabel 1.3. Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strengths 1. Dukungan regulasi perizinan sediaan farmasi dan pangan olahan 2. Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor yang Solid 3. Dukungan Anggota Legislatif terkait KIE Masyarakat 4. Pengalaman dan Kompetensi Teknis SDM Balai POM di Bengkulu 5. Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi 6. Infrastruktur Pelayanan Publik yang Memenuhi Standar	Weakness 1. Keterbatasan sumber daya untuk mengawasi seluruh sarana obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Bengkulu 2. Belum berhasil mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) disebabkan belum optimalnya lingkungan pengendalian.
Opportunity 1. Pengembangan Produk Lokal Khas Bengkulu yang Potensial 2. Kolaborasi Jejaring Nasional Laboratorium 3. Alokasi Dana DAK NF POM untuk Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Efisiensi Pengawasan 5. Perubahan Presepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik UPT 6. Pertumbuhan Pasar dan Perdagangan Digital 7. Dukungan dari media dan influencer lokal	Threats 1. Peredaran Produk Ilegal, Palsu dan Tidak Terdaftar Melalui <i>E-commerce</i> dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan 2. Tingkat Kesadaran Masyarakat terkait sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu masih rendah 3. Pengurangan Anggaran 4. Insiden Terjadinya KLB KP Meningkat 5. Perubahan perilaku konsumen



BAB II

VISI, MISI, DAN

TUJUAN

RENSTRA 2025–2029

Balai POM di Bengkulu
Tahun 2025

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

II.1 Visi 2025 – 2029

Balai POM di Bengkulu sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan dituntut untuk pengawasan obat dan makanan yang berkualitas sesuai standar yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029, yaitu:

" Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

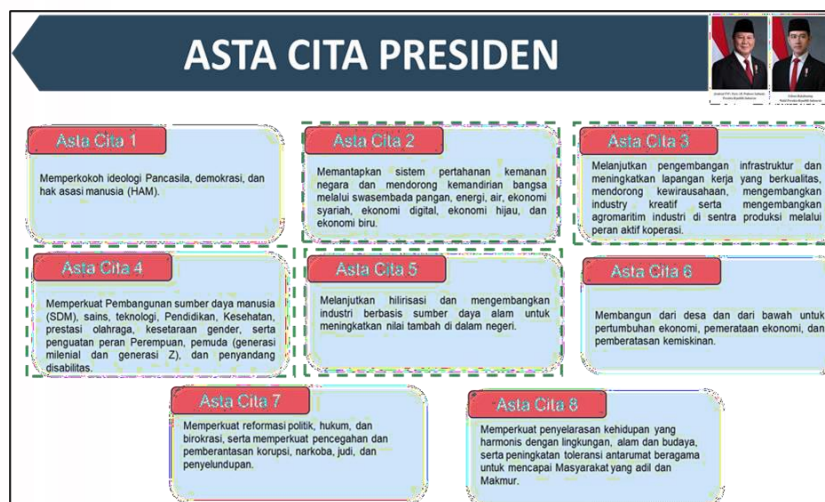
Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupayamemastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing dipasar global. Hal ini melibatkan peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi terhadap nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

II.2 Misi 2025 – 2029

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih.



Gambar 2.1. Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu “**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas**”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi Percepatan Pengembangan Dunia Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global

3. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Mengembangkan Kemitraan Bersama seluruh Pemangku Kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis

4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Bengkulu sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan Misi BPOM.

II.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi BPOM, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM periode 2025 - 2029, mencakup aspek

keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

NO	Tujuan	indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9

5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5
---	---	----------------	------	-------	------	-------	------

Balai POM di Bengkulu sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

II.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Bengkulu, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Bengkulu akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya Efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu.

Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wWilayah Kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang Prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem,

peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.2. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Bengkulu periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat dan Sejahtera Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang Aman dan Bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Sediaan</i>	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan</i> 2. <i>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan</i> 4. <i>Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar</i> 5. <i>Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan</i> 6. <i>Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder</i> 7. <i>Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan</i> 8. <i>Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan</i> 9. <i>Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap Standar yang Ditetapkan</i>	10. <i>Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan</i> 11. <i>Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan</i> 12. <i>Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar</i> 13. <i>Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sSesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan (2026-2029)</i> Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>dan Pangan Olahan</i>		
Memfasilitasi Percepatan Pengembangan Dunia Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Dukungan yang Kuat terhadap UMKM <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya Efektivitas <i>Regulatory Assistance</i> dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu <i>Indikator: Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetika yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan</i>

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Balai POM di Bengkulu tahun 2025-2029, perlu dilakukan identifikasi risiko pada setiap sasaran kegiatan. Proses ini merupakan bagian integral dari perencanaan strategis untuk memastikan pengelolaan risiko yang sistematis. Dengan mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini, Balai POM di Bengkulu dapat merumuskan langkah mitigasi yang tepat guna mendukung pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Berikut adalah tabel identifikasi indikasi risiko dari sasaran kegiatan yang telah disusun:

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Bengkulu

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	SK 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha dalam Pemenuhan dan Kepatuhan terhadap Standar yang Berlaku serta dalam Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Sarana di Wilayah Kerja BPOM di Bengkulu	- Melakukan Pendampingan terhadap Pelaku Usaha salah satunya Melalui Inovasi “Rimbang”(Ruang Informasi UMKM Berkembang) - Melakukan pendampingan dalam hal penyelesaian CAPA tindak lanjut hasil pemeriksaan	Substansi Pemeriksaan
		Tidak optimalnya fungsi peralatan utama dan penunjang laboratorium dalam pelaksanaan pengujian yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pengujian sampel	- Penyusunan roadmap/sensus peremajaan peralatan berbasis manajemen aset dan prioritas risiko komoditas - Perencanaan anggaran pengadaan alat dan suku cadang	Subbagian Tata Usaha dan Substansi Pengujian
2	SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Tidak terpenuhinya persyaratan standar dari Sarana produksi fortifikasi yang mengakibatkan produk tidak memenuhi standar mutu.	- Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pemenuhan fasilitas peralatan dan kompetensi proses produksi.	Substansi Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
3	SK 3: Meningkatkan efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman dilihat dari data tren capaian survey efektivitas KIE.	- Penyederhanaan konten KIE dengan bahasa yang lebih mudah dan analogi yang dekat dengan kehidupan sehari hari konsumen - Melakukan uji coba materi pada perwakilan konsumen, lalu merevisi berdasarkan umpan balik materi yang dipahami .	Substansi Infokom
4	SK 4: Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rendahnya komitmen UMKM dalam hal pemenuhan standar keamanan dan mutu.	Optimalisasi pelaksanaan inovasi “Rimbang”, “Percaya Juara”, “Percaya Juara Keren” dalam pendampingan UMKM	Substansi Pemeriksaan dan Infokom
5	SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Penyidikan tidak terlaksana hingga tahap 2 dikarenakan adanya Intervensi dari pihak lain terhadap Kasus dan Perkara yang sedang di tangani.	Memperkuat Koordinasi dengan pimpinan stakeholder (Polda) sebagai langkah antisipatif untuk Pencegahan kondisi terjadinya Intervensi	Substansi Penindakan
6	SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Tingginya tingkat kejahatan menggunakan media penjualan online <i>Cyber-crime</i> menyebabkan pola penanganan deteksi kejahatan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sulit dilakukan.	- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM dalam analisis kejahatan Obat dan Makanan - Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dalam deteksi kejahatan Obat dan Makanan	Substansi penindakan
7	SK 7: Layanan Publik UPT yang prima	Terjadinya praktek KKN, Pungli, Gratifikasi dan pemerasan pada pelaksanaan pelayanan publik yang menyebabkan turunnya reputasi Masyarakat kepada BPOM Bengkulu.	- Menanamkan nilai integritas kepada petugas lewat pelatihan/sosialisasi anti gratifikasi - Mengkampanyekan kanal kanal pengaduan masyarakat BPOM	Subbagian Tata Usaha, Substansi Infokom, Substansi Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			- Bengkulu kepada pelaku usaha untuk pelaporan terkait praktek suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Petugas BPOM - Mengkampanyekan saluran WBS deteksi kejahatan Obat dan Makanan	
8	SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Belum efektifnya proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), sebagai tindak lanjut rekomendasi evaluasi internal untuk memperbaiki kinerja di periode selanjutnya	Melakukan penguatan terhadap mekanisme monitoring dan pelaporan untuk memastikan progres tindak lanjut berjalan secara konsisten.	Subbagian Tata Usaha



BAB III

ARAH KEBIJAKAN

DAN STRATEGI

RENSTRA 2025–2029

Balai POM di Bengkulu
Tahun 2025

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1 Arah kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. **Penguatan Pengawasan *Pre-Post Market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Mendorong Inovasi untuk Mengawal Farmakovigilans, Perluasan Cakupan Pengawasan Termasuk Produk dan Sarana yang Tidak Berizin, serta Program MBG** : Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Mengedepankan Pencegahan/Deteksi Kejahatan pada Peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Secara *Online* dan *Offline*** : Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. **Peningkatan *Regulatory Assistance* dan Pendampingan Pelaku Usaha dengan Dukungan yang Kuat terhadap UMKM** : BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar
4. **Peningkatan Kesadaran serta Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** : Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan
5. **Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan Dalam dan Luar Negeri di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** : BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. **Peningkatan Kapasitas SDM, Kualitas Pengujian Laboratorium, Analisis Kebijakan, dan Transformasi Digital dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** : BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 7. Penguatan Dukungan Manajemen di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik :** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1. Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Bengkulu

Balai POM di Bengkulu mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan BPOM 2025-2029, Arah Kebijakan dan Strategi di Balai POM di Bengkulu 2025-2029 akan mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi BPOM, dengan penyesuaian yang relevan sesuai tugas dan fungsi BPOM di Bengkulu serta analisis SWOT pada BPOM Bengkulu. Strategi dan Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Optimalisasi Pengawasan *Pre Market* dan *Post Market* di Sarana Produksi dan Peredaran dengan Memperkuat Kemitraan dengan Lintas Sektor untuk Menjamin Produk yang Beredar Sesuai dengan Standar yang Berlaku. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu;

- a. Peningkatan Efektivitas Pengawasan *Pre-Market* Melalui Pembinaan dan Bimbingan Teknis ke Pelaku Usaha Terkait Tata Cara Pengajuan Izin Edar, Penerapan CPOTB, CPPOB, CPKB, dan Standar Lainnya, serta Pemberian Asistensi Khusus bagi UMKM Melalui Kolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi/UMKM.
 - b. Peningkatan Mutu Pengawasan *Post-Market* Melalui Kegiatan Inspeksi dan Audit Sarana Produksi, Pengawasan Produk di Peredaran dengan Melaksanakan *Sampling* Produk di Pasar Berdasarkan *Risk-Based*, Melakukan Pengujian Laboratorium Sesuai dengan Parameter Keamanan dan Mutu.
 - c. Tindak Lanjut terhadap Hasil Pengawasan *Pre* dan *Post Market*, Berupa Pemberian Sanksi Administrasi Baik Peringatan Tertulis, Rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan, ataupun Rekomendasi Pencabutan Izin Edar.
 - d. Penguatan Kemitraan Lintas Sektor Melalui Kegiatan Penguatan Jejaring Pengawasan, Sinergi Edukasi Publik dan Kampanye Keamanan Produk Seperti Melaksanakan Kampanye Bersama “Cek KLIK”, Keamanan Pangan, serta Mengoptimalkan Kanal Komunikasi Publik Lintas Sektor (Media Sosial).
 - e. Penguatan Kapasitas SDM dan Sarana Pengawasan, dengan Melaksanakan Pelatihan Teknis Pengawasan untuk Petugas Lintas Sektor, Meningkatkan Dukungan Laboratorium Pengujian Melalui Kerja Sama dengan Laboratorium Pemerintah Lain.
2. Memperkuat Komitmen dan Kerja Sama dengan Jejaring Penegak Hukum serta *Stakeholder* dalam Hal Pencegahan Kejahatan Peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Ilegal dari Sarana *Offline* maupun *Online*.

astasi Dalam menghadapi meningkatnya kejahatan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, baik melalui sarana offline maupun online, BPOM Bengkulu memandang perlu adanya penguatan komitmen dan kolaborasi strategis dengan jejaring penegak hukum serta para pemangku kepentingan terkait. Hal ini telah direalisasikan dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan POLDA Bengkulu dalam peningkatan kerjasama dalam tugas dan fungsi pada tahun 2025. Hal ini sangat penting dikarenakan kejahatan di bidang obat dan makanan semakin kompleks, lintas wilayah, dan sering kali memanfaatkan celah regulasi maupun

teknologi digital, sehingga penanganannya membutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan.

Strategi penguatan kolaborasi ini dilakukan melalui beberapa pendekatan kunci. Pertama, BPOM memperkuat koordinasi operasional dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah untuk memastikan penindakan terhadap pelaku berjalan cepat dan terukur. Melalui pembentukan tim terpadu serta pelaksanaan operasi bersama, pengawasan di lapangan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga peredaran produk ilegal di pasar fisik dapat diminimalisir.

Memperluas jejaring dengan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, asosiasi Jasa logistik, dan platform digital, guna memperkuat sistem pencegahan. Dalam ranah digital, kerja sama dengan platform e-commerce dan media sosial menjadi langkah krusial untuk melacak akun yang mempromosikan atau menjual produk ilegal, sekaligus mempercepat proses takedown konten berbahaya. Pendekatan ini diperkuat melalui pemanfaatan teknologi intelijen digital dan patroli siber berbasis risiko.

3. Intensifikasi Pendampingan dan Fasilitasi Pelaku Usaha untuk Peningkatan Daya Saing UMKM. Balai POM di Bengkulu Melaksanakan Beberapa Kegiatan, antara lain:
 - a. Pemetaan dan penetapan target sarana UMKM yang akan didampingi
 - b. Pendampingan Teknis Produksi dan Keamanan Pangan melalui sosialisasi keamanan pangan dan bimbingan teknis CPPOB, CPPOTB,CPKB.
 - c. Pendampingan onsite ke tempat produksi untuk identifikasi masalah sanitasi, higienitas, dan alur produksi.
 - d. Penyusunan dan pendampingan penerapan SSOP, GMP, dan hazard sederhana bagi UMKM.
 - e. Pemberian checklist untuk penilaian mandiri agar pelaku usaha bisa mengevaluasi sendiri standar CPPOB, CPPOTB, dan CPKB
 - f. Melayani konsultasi secara luring maupun daring melalui inovasi Ruang Tamu Virtual BPOM di Bengkulu
 - g. Fasilitasi akses layanan uji laboratorium untuk pangan risiko menengah tinggi, obat tradisional dan kosmetik.
 - h. Pendampingan perbaikan desain label sesuai aturan BPOM dan perdagangan

Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kepatuhan, tetapi juga membantu UMKM Bengkulu memproduksi produk berkualitas, memperkuat daya saing, dan memperluas jangkauan pasar hingga tingkat nasional.

4. Intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang memenuhi syarat.

Balai POM di Bengkulu terus mengembangkan dan mengintensifkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) sebagai bagian integral dari strategi perlindungan masyarakat terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi standar. Meskipun pengawasan dan penindakan merupakan bagian penting dari upaya ini, Balai POM di Bengkulu menyadari bahwa pendekatan yang berbasis pada kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan. Oleh karena itu, intensifikasi KIE menjadi strategi utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar, cerdas, dan bertanggung jawab dalam memilih produk yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

Untuk menjawab tantangan dalam memperluas jangkauan edukasi, Balai POM di Bengkulu memanfaatkan berbagai platform dan media yang adaptif dengan perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat. KIE dilakukan melalui kampanye publik yang bersifat edukatif dan persuasif, serta sosialisasi langsung di komunitas untuk menjangkau kelompok masyarakat secara langsung dan personal. Selain itu, pemanfaatan media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, menjadi sarana penting untuk memperluas jangkauan pesan, terutama untuk kelompok masyarakat yang lebih muda.

Untuk menjangkau kelompok rentan dan daerah terpencil, Balai POM di Bengkulu telah mengembangkan berbagai inovasi komunikasi publik yang sangat relevan dengan kondisi lokal. Salah satunya adalah penggunaan BPOM Mobile, yang memungkinkan BPOM untuk menjangkau masyarakat di desa-desa yang sulit dijangkau oleh metode konvensional. Penyuluhan berbasis komunitas dan pemanfaatan platform digital interaktif juga menjadi terobosan yang efektif dalam menyampaikan pesan edukasi secara lebih terintegrasi dan menyeluruh. Teknologi digital memungkinkan BPOM untuk menyampaikan informasi yang lebih personal dan mudah diakses, memberikan pengalaman edukasi yang lebih menarik bagi masyarakat.

Selain itu, Balai POM di Bengkulu juga menggencarkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini penting dalam memperluas jaringan edukasi serta meningkatkan kredibilitas dan efektivitas pesan yang disampaikan. Pembentukan jejaring edukasi ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi dalam penyampaian informasi serta mengoptimalkan peran berbagai pihak dalam memerangi peredaran produk ilegal.

Konten edukasi yang disusun oleh Balai POM di Bengkulu selalu berfokus pada kesederhanaan dan kejelasan. Pesan-pesan yang disampaikan mencakup informasi penting tentang cara mengenali produk yang telah terdaftar, memahami label dan informasi gizi, membedakan produk asli dan palsu, serta mengetahui risiko kesehatan dari produk yang ilegal atau tidak memenuhi standar. Semua informasi ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai lapisan, baik yang terpelajar maupun yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Untuk memperkuat dampak dari kegiatan KIE, Balai POM di Bengkulu melibatkan tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, akademisi, dan influencer lokal sebagai agen perubahan (agents of change) yang turut berperan dalam menyebarkan informasi yang benar mengenai keamanan obat dan pangan. Peran mereka sangat penting dalam memperluas jangkauan pesan edukasi dan meningkatkan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan melibatkan elemen-elemen kunci ini, Balai POM di Bengkulu memastikan bahwa pesan edukasi dapat diterima dengan lebih baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Melalui berbagai inovasi ini, Balai POM di Bengkulu tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang lebih sehat dan aman dalam memilih produk. Masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya keamanan obat dan pangan memiliki kapasitas lebih besar untuk mengambil keputusan yang cerdas, kritis, dan berbasis pada informasi yang akurat. Pada akhirnya, intensifikasi KIE berkontribusi langsung pada terciptanya lingkungan yang lebih aman dari peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang ilegal, serta memperkuat peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan.

Dengan demikian, strategi intensifikasi KIE yang dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu bukan hanya berfokus pada penyuluhan, tetapi juga menciptakan ekosistem kolaboratif

yang mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih cerdas dalam memilih dan mengawasi sediaan farmasi dan pangan yang aman.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terutama dalam pemenuhan cakupan pengawasan melalui optimalisasi Dana DAK-NF POM. Strategi ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain :

- a. Perencanaan Terpadu antara Dinas Kesehatan dan BPOM dengan Memberikan arahan teknis penyusunan rencana kegiatan berbasis risiko dan memantau kesesuaian rencana daerah dengan standar nasional BPOM
- b. Penguatan Kapasitas Petugas Daerah melalui peningkatan kompetensi dengan berperan sebagai narasumber, mentor, dan pemberi modul standar.
- c. Pelaksanaan Pengawasan Lapangan oleh Dinas Kesehatan dimana BPOM akan Melakukan supervisi dan pemantauan periodic untuk menjamin bahwa metode pemeriksaan sesuai standar BPOM.
- d. BPOM menyediakan referensi teknis parameter uji dan menyediakan fasilitas layanan pengujian sebagai sampel PNB
- e. Monitoring & Evaluasi Pemanfaatan DAK NF POM dengan melakukan review teknis terhadap output dan capaian lapangan serta memberikan umpan balik untuk perbaikan rencana tahun berikutnya

6. Penguatan pengelolaan SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan inovasi digital untuk mendukung tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pengujian laboratorium.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan dalam pengawasan obat dan makanan. Tanpa kompetensi yang relevan, upaya pengawasan akan menjadi kurang efektif dan tidak mampu mengikuti dinamika pasar yang terus berubah. Untuk menutup kesenjangan ini, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan menjadi suatu keharusan.

Balai POM di Bengkulu berkomitmen memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pengembangan inovasi berbasis digital. Langkah digitalisasi diwujudkan melalui beberapa inovasi yang telah dijalankan di Balai POM di Bengkulu antara lain SIPENA (Sistem Informasi Persediaan Bengkulu Punya), SIBAKTI (Login Sistem Barang Bukti Penindakan), SIMPAN KANTOR (Sistem Informasi Pemeliharaan

Kantor), SIMBA (Sistem Manajemen Permintaan Barang), LAPOR PASTI (Laporan Pengaduan WBS Internal Terpadu dan Integratif Balai POM di Bengkulu) dan SIDOCIK (system Informasi Data Capaian indikator Kinerja).

Dengan inovasi ini, proses bisnis pengawasan di Balai POM Bengkulu menjadi lebih efisien, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengujian laboratorium beberapa inovasi berbasis digital dikembangkan seperti SINTAGELIS (Sistem Informasi Pencatatan Alat Gelas), SINTACAKEPS (Sistem Informasi Pencatatan Kelembapan dan Suhu), dan INSTRUMATE (Instrument Maintenance & Assistance).

Selain itu, peningkatan kolaborasi laboratorium dan pengembangan green laboratorium menjadi bagian penting dari transformasi Balai POM di Bengkulu dalam memperkuat sistem pengawasan berbasis sains yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Bengkulu berperan aktif dalam memperkuat jejaring dan regionalisasi laboratorium BPOM, di mana laboratorium di setiap wilayah saling berkoordinasi dalam berbagi peran, kapasitas uji, serta hasil analisis untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi mutu pengujian.

Balai POM di Bengkulu juga mengimplementasikan konsep green laboratory untuk menciptakan sistem pengujian yang ramah lingkungan dan efisien energi. Strategi ini diwujudkan melalui pengelolaan limbah bahan kimia laboratorium secara terstandar, efisiensi penggunaan air dan listrik, serta penerapan digitalisasi dalam manajemen data pengujian untuk mengurangi penggunaan kertas. Pengembangan green laboratory ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan lingkungan, tetapi juga mendukung target nasional menuju laboratorium berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Balai POM di Bengkulu berupaya menjaga akurasi dan keandalan hasil uji sambil meminimalkan dampak ekologis kegiatan pengujian. Sinergi antara kolaborasi lintas sektor dan transformasi laboratorium hijau menjadikan Balai POM di Bengkulu sebagai model unit pengawasan yang unggul, modern, dan berwawasan lingkungan

7. Mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dalam tata kelola Organisasi serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik

BPOM Bengkulu dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, menerapkan Reformasi Birokrasi menjadi pilar utama dalam penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada aspek tata kelola organisasi, berbagai langkah strategis dilakukan untuk memastikan proses manajemen internal berjalan lebih terstruktur dan berstandar tinggi. Optimalisasi perencanaan kinerja, penyederhanaan prosedur kerja, serta penataan kelembagaan dilakukan guna memperkuat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, audit internal yang berkesinambungan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi proses administrasi. Upaya ini tidak hanya meningkatkan integritas organisasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan program berjalan sesuai prinsip good governance.

Dalam peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik, Reformasi Birokrasi diwujudkan melalui pengembangan layanan yang sederhana, cepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Prosedur layanan yang sebelumnya panjang dan manual disederhanakan melalui digitalisasi dan pemanfaatan aplikasi layanan terpadu. Inovasi pelayanan, termasuk standardisasi waktu layanan, penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses, serta pemantauan kepuasan publik secara berkala, menjadi instrumen penting untuk memastikan layanan publik semakin responsif dan berorientasi pada pengguna. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui pelatihan teknis dan penguatan kompetensi layanan, sehingga pegawai mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas.

Tabel 3.2. Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM Bengkulu 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Optimalisasi pengawasan pre market dan Post market di sarana produksi dan peredaran dengan memperkuat kemitraan dengan lintas sektor untuk menjamin produk yang beredar sesuai dengan standar yang berlaku.

Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat Komitmen dan Kerjasama dengan jejaring penegak hukum serta <i>stakeholder</i> dalam hal pencegahan kejahatan peredaran sediaan farmasi dan pangan Olahan ilegal dari sarana <i>offline</i> maupun <i>online</i> .
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha untuk peningkatan daya saing UMKM.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang memenuhi syarat.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terutama dalam pemenuhan cakupan pengawasan melalui optimalisasi Dana DAK-NF POM
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Penguatan pengelolaan SDM melalui Pendidikan dan pelatihan. 2. Pengembangan inovasi <i>Green laboratory</i> berupa inovasi INSTRUMATE dalam mengoptimalkan pemeliharaan dan penggunaan peralatan secara berkelanjutan untuk menjaga validitas hasil pengujian
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dalam tata kelola Organisasi serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik .

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi BPOM Bengkulu juga dilaksanakan secara *responsif gender* dan inklusi sosial.

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategis diatas Balai POM di Bengkulu melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Provinsi Bengkulu dan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM di Bengkulu.

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan sarana premarket meliputi sarana produksi pangan olahan, kosmetik dan Obat Bahan yang dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Sementara untuk pengawasan post market meliputi sarana distribusi obat, kosmetik, Obat bahan Alam, Suplemen, Obat Kuasi dan sediaan Pangan Olahan. dan Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor..

Untuk menjamin mutu hasil pengawasan, kapasitas laboratorium terus diperkuat melalui pengadaan sarana uji, peningkatan kompetensi analis, perluasan metode pengujian, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Sampel yang diuji mencakup beragam produk seperti pangan, obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan bahan berbahaya.

Di bidang penegakan hukum, Balai POM di Bengkulu melaksanakan operasi intelijen, penyidikan, penindakan, dan pemberkasan guna memastikan kepatuhan dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

Selain itu, hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM fungsi manajerial dijalankan untuk mendukung Reformasi Birokrasi, meliputi pengelolaan BMN, belanja pegawai, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Pengelolaan aset dilakukan secara tertib dan akuntabel melalui pencatatan, inventarisasi, optimalisasi pemanfaatan, serta pelaporan berkala.



BAB IV

TARGET KINERJA

DAN KERANGKA

PENDANAAN

RENSTRA 2025–2029

Balai POM di Bengkulu
Tahun 2025

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Bengkulu untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai POM di Bengkulu dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Bengkulu selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai POM di Bengkulu, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Balai POM di Bengkulu menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 yang diarahkan untuk mencapai sasaran akhir, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Balai POM Di Bengkulu 2025-2029

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01. Persentase sampel Sediaan Farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.50	88.00	89.25	90.50	91.75
		02. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00
		03. Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00
		04. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		05. Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00
		06. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
		07. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00	87,5	88.50	90.00	91.50

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
	08. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00
	09. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75	96.75	97.75	98.50	99.25
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00
	11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.00	92.20	93.20	94.20	95.20
	12 .Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
	13.Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	100	100	100	100
	14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75.00	77.00	79.00	81.00	83.00

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29	28.57	42.86	57.14	71.43
		16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	2.1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50.00	67.00	67.00	83.00	83.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	3.1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.31	88.18	89.06	89.93	90.8
		3.2 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11	12	13	14	15
		3.3 Jumlah desa pangan aman	3	6	6	7	7
		3.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	4.1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.12	29.41	48.24	69.41	92.94

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	5.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	6.1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang prima	7.1 Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	8.1 Nilai Pembangunan ZI	90.72	90.97	91.22	91.47	91.72
		8.2 Nilai AKIP UPT	80.59	81.30	81.50	81.70	82.00
		8.3 Nilai Kinerja Anggaran UPT	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		8.4 Indeks Manajemen Risiko UPT	2.88	3.30	3.40	3.60	3.80

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya kegiatan pengawasan obat dan makanan di Balai POM Bengkulu di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.1. Kerangka Pendanaan BPOM Bengkulu 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	14,905.392	7,696.434	8,466.077	9,312.685	10,243.953
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,174.051	10,839.229	11,923.152	13,115.467	14,427.014
Total	26,079.443	18,535.663	20,389.229	22,428.152	24,670.967

Tabel 4.2.2. Kerangka Pendanaan BPOM Bengkulu 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	24,779.443	17,235.663	19,089.229	21,128.152	23,370.967
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1,300.000	1,300.000	1,300.000	1,300.000	1,300.000
Total	26,079.443	18,535.663	20,389.229	22,428.152	24,670.967



BAB V

PENUTUP

RENSTRA 2025–2029

Balai POM di Bengkulu
Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Balai POM di Bengkulu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029, Renstra ini merupakan dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan perencanaan di lingkungan Balai POM di Bengkulu. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi yang akan menjadi acuan dalam perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan, sehingga seluruh proses perencanaan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan konsisten.dengan mempertimbangkan karakteristik, tantangan, dan kebutuhan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Bengkulu.

Renstra disusun menggunakan pendekatan Analisis SWOT untuk memetakan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman), sehingga Balai POM di Bengkulu dapat merumuskan strategi SO, WO, ST, dan WT secara tepat sesuai kondisi nyata. Analisis ini memastikan setiap program dan kebijakan memiliki landasan yang kuat, terukur, serta memberikan kejelasan peran bagi seluruh personil dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Dengan demikian, Analisis SWOT menjadi instrumen penting dalam penyusunan Rencana Aksi dan Rencana Kinerja yang tersusun lebih terarah, terstruktur, dan terintegrasi.

Renstra Balai POM di Bengkulu Tahun 2020–2025 merupakan dokumen acuan kerja dan komitmen utama bagi seluruh unit kerja. Sebagai dokumen strategis, Renstra ini menjadi pedoman operasional yang mengikat dan harus dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian. Renstra ini juga menjadi dasar pemantauan dan evaluasi kinerja Balai POM di Bengkulu secara periodik untuk memastikan tercapainya visi dan misi dalam menjamin keamanan sediaan farmasi dan pangan di Provinsi Bengkulu.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran Balai POM di Bengkulu serta dukungan aktif para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat. Dengan semangat kolaboratif dan inovatif, Balai POM di Bengkulu berkomitmen menjalankan peran strategisnya dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.

LAMPIRAN

Tabel 4.2 Matriks Kerangka Pendanaan Balai POM Di Bengkulu 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Besar POM di Bengkulu								26,079.443	18,535.663	20,389.229	22,428.152	24,670.967	UPT BPOM	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								14,905.392	7,696.434	8,466.077	9,312.685	10,243.953	UPT BPOM	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		BPOM di Bengkulu										UPT BPOM	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bengkulu	86.50	88.00	89.25	90.50	91.75					UPT BPOM	
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	BPOM di Bengkulu	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00					UPT BPOM	
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bengkulu	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00					UPT BPOM	

	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	BPOM di Bengkulu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bengkulu	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	BPOM di Bengkulu	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bengkulu	87.00	87,5	88.50	90.00	91.50						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bengkulu	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bengkulu	95.75	96.75	97.75	98.50	99.25						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bengkulu	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	BPOM di Bengkulu	91.00	92.20	93.20	94.20	95.20						UPT BPOM

	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	BPOM di Bengkulu	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	BPOM di Bengkulu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BPOM di Bengkulu	75.00	77.00	79.00	81.00	83.00						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	BPOM di Bengkulu	14.29	28.57	42.86	57.14	71.43						
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPOM di Bengkulu	-	81.00	82.00	83.00	84.00						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		BPOM di Bengkulu	45.00	45.00	50.00	55.00	60.00	45.000	23.251	25.576	28.134	30.947	UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BPOM di Bengkulu	307.00	307.00	322.00	338.00	387.00	416.808	215.364	236.900	260.590	286.649	UPT BPOM

	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	BPOM di Bengkulu	715.00	621.00	759.00	798.00	841.00	515.395	266.304	292.934	322.228	354.451	UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	BPOM di Bengkulu	36.00	38.00	42.00	46.00	50.00	24.915	12.873	14.160	15.576	17.134	UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	BPOM di Bengkulu	289.00	325.00	354.00	385.00	417.00	374.383	193.443	212.787	234.066	257.473	UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	BPOM di Bengkulu	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00			-			UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	BPOM di Bengkulu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,812.605	1,969.973	2,166.970	2,383.667	2,622.034	UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BPOM di Bengkulu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,940.006	1,002.401	1,102.641	1,212.905	1,334.196	UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BPOM di Bengkulu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,417.220	1,248.977	1,373.875	1,511.262	1,662.388	

	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar	BPOM di Bengkulu	-	268.00	268.00	268.00	268.00			-			UPT BPOM
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	BPOM di Bengkulu	-	-	-	-	-			-			UPT BPOM
1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		50.00	67.00	67.00	83.00	83.00			-			UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.170	2.154	2.369	2.606	2.867	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE	BPOM di Bengkulu	-	-	-	-	-			-			UPT BPOM
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		87.31	88.18	89.06	89.93	90.80			-			UPT BPOM
2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		11.00	12.00	13.00	14.00	15.00			-			UPT BPOM
3	Jumlah desa pangan aman		3.00	6.00	6.00	7.00	7.00			-			UPT BPOM
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1.00	1.00	1.00	2.00	2.00			-			UPT BPOM

	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			9,778.00	9.78	9.93	10.12	10.34	2,935.677	1,516.864	1,668.550	1,835.405	2,018.946	UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			17.00	12.00	14.00	15.00	16.00	74.777	38.637	42.501	46.751	51.426	UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	474.948	245.405	269.946	296.940	326.634	UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman			3.00	6.00	6.00	7.00	7.00	505.661	261.275	287.403	316.143	347.757	UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	143.383	74.085	81.494	89.643	98.607	UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		BPOM di Bengkulu	-	-	-	-	-			-			UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		14.12	29.41	48.24	69.41	92.94			-			UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			14.00	15.00	17.00	19.00	20.00	54.347	28.081	30.889	33.978	37.376	UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		BPOM di Bengkulu	-	-	-	-	-			-			UPT BPOM

	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		95.00	96.00	97.00	98.00	99.00			-			UPT BPOM
		RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	229.080	118.365	130.202	143.222	157.544	UPT BPOM
		Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	BPOM di Bengkulu	-	-	-	-	-			-			UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90.00	91.00	92.00	93.00	94.00			-			UPT BPOM
		RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	210.132	108.575	119.433	131.376	144.513	UPT BPOM
		Layanan Publik UPT yang prima	BPOM di Bengkulu	-	-	-	-	-			-			UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4.70	4.75	4.80	4.85	4.90			-			UPT BPOM
		RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		304.00	341.00	364.00	386.00	415.00	30.885	15.958	17.554	19.309	21.240	UPT BPOM
		Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	BPOM di Bengkulu	-	-	-	-	-			-			UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		90.72	90.97	91.22	91.47	91.72			-			UPT BPOM dan Direktorat Kedeputusan 1,2,3,4

	2	Nilai AKIP UPT BPOM		80.59	81.30	81.50	81.70	82.00			-			UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			-			UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2.88	3.30	3.40	3.60	3.80			-			UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		-	-	-	-	-			-			UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar		-	-	-	-	-			-			UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT		-	-	-	-	-			-			UPT BPOM
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	566.000	292.452	321.697	353.867	389.254	UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50.000	25.835	28.419	31.260	34.386	UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	80.000	36.162	39.778	43.756	48.132	UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			BPOM di Bengkulu						11,174.051	10,839.229	11,923.152	13,115.467	14,427.014	UPT BPOM

	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.000	5.000	5.500	6.050	6.655	UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11,166.051	10,834.229	11,917.652	13,109.417	14,420.359	UPT BPOM

Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Tahun 2025–2029

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Tahun 2025–2029, dengan ini menetapkan susunan Tim Penyusun Renstra sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai POM di Bengkulu
2. Koordinator : Kepala Subbagian Tata Usaha
3. Ketua : Ummi Abidah, SE
4. Sekretaris : Kanthi Lestari, SKM, MAP
5. Anggota :
 - Silvia Gandarosa, S.Si., Apt, M.Sc
 - Yunika Sary, S.Farm., Apt, M.Si
 - Mukhlisah, S.Si, Apt
 - Denton RM Simamora, S.Si
 - Sri Mufti Dianis Saraan, S.Farm., Apt, M.Si
 - Anisa Prima Hilmi, S.Far., Apt
 - Novi Fitriani, S.Farm., Apt
 - Zul Amri, S.Si., Apt, M.Kes
 - Osah Apriyanti, S.Farm., Apt
 - Tuti Amalia As, S.Farm., Apt
 - Gomgom Portibi Pakpahan, SH, MH
 - Anita Eka Julya Banjarnahor, S.Si., M.Sc
 - M. Dwiki Dharmawan, A.Md
 - Etri Enda Rosita, A.Md